

Lampiran 1. Jadwal Penelitian

**RENCANA KEGIATAN UJIAN AKHIR PROGRAM TAHAP AKADEMIK
PROGRAM STUDI ILMU MANAJEMEN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

No.	Kegiatan	WAKTU																																			
		Agustus 2025				September 2025				Oktober 2025				Nopember 2025				Desember 2025				Januari 2026				Februari 2026				Maret 2026				April 2026			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1.	Bimbingan Proposal																																				
2.	ACC proposal																																				
3.	Ujian Proposal																																				
4.	Pengumpulan data																																				
5.	Seminar Hasil Tesis																																				
6.	Perbaikan dan pengumpulan																																				
7.	Ujian Kelayakan																																				
8.	Ujian tesis																																				

Lampiran 2. Surat Ijin Pengambilan Data



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Udayana No. 11 Singaraja, Bali 81116 Telepon. 081999446444 Laman www.pasca.undiksha.ac.id

Nomor : 6015/UN48.14.1/PT.02.05/2025
Lamp : -
Perihal : Mohon Izin Pengambilan Data

Yth. KEPALA DESA PEMERINTAH DESA BAKTISERAGA
di tempat

Dengan hormat, dalam rangka pengumpulan data untuk Penelitian Tesis mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha, bersama ini kami mohon kesedian Bapak/Ibu untuk dapat menerima dan mengijinkan mahasiswa kami dengan identitas:

Nama : KADEK DWINDA YUDHA PRATAMA
NIM : 2429131027
Program studi : Ilmu Manajemen (S2)
Judul Penelitian : TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA BAKTISERAGA SEBAGAI BEST PRACTICE GOOD GOVERNANCE DI KABUPATEN BULELENG

untuk mendapatkan data/informasi yang dibutuhkan oleh mahasiswa dalam melakukan penelitian.
Demikian disampaikan, atas berkenaan dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Singaraja, 24 November 2025

a.n Direktur,

Wakil Direktur I,



Ida Bagus Putu Arnyana
NIP. 195812311986011005

Tembusan :

1. Kepala Subbagian Program Pascasarjana
2. Mahasiswa yang bersangkutan



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia

Lampiran 3. Lembar Permohonan Menjadi Partisipan

PERMOHONAN MENJADI PARTISIPAN

Kepada Yth. _____

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah mahasiswa Program Pascasarjana
Magister Ilmu Manajemen Universitas Pendidikan Ganesha :

Nama : Kadek Dwindu Yudha Pratama

NIM : 2429131027

No. WA : 085739787052

Akan melakukan penelitian dengan judul: “Tata Kelola Pemerintahan Desa Baktiseraga Sebagai *Best Practice Good Governance* di Kabupaten Buleleng”. Penelitian ini tidak akan menimbulkan akibat yang merugikan bagi Bapak/Ibu sebagai responden. Kerahasiaan semua informasi akan dijaga dan dipergunakan untuk kepentingan penelitian. Jika Bapak/ Ibu tidak bersedia menjadi partisipan dalam penelitian ini, maka tidak ada ancaman bagi Bapak/ Ibu. Jika Bapak/ Ibu menyetujui, maka saya mohon kesediaan Bapak/ Ibu untuk menandatangani lembar persetujuan saya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya sertakan.

Atas perhatian dan kesediaan Bapak/ Ibu sebagai partisipan saya ucapkan terima kasih.

Peneliti,

Kadek Dwindu Yudha Pratama

Lampiran 4 Lembar Persetujuan Menjadi Partisipan

PERSETUJUAN MENJADI PARTISIPAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini adalah:

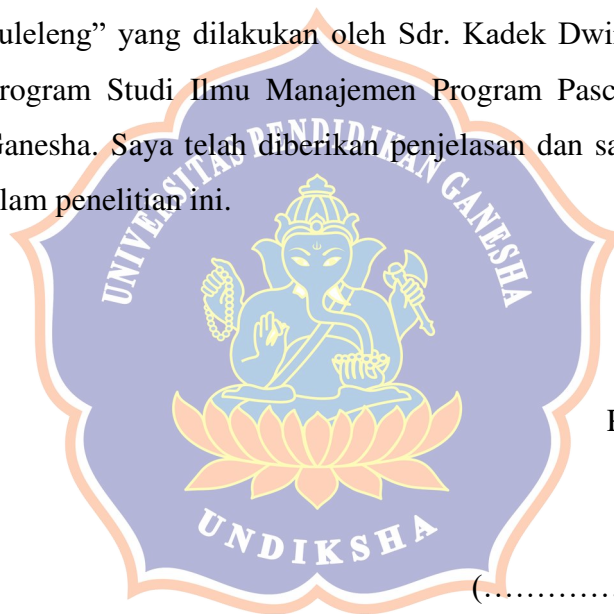
Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat asal :

Menyatakan bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian tentang “Tata Kelola Pemerintahan Desa Baktiseraga Sebagai *Best Practice Good Governance* di Kabupaten Buleleng” yang dilakukan oleh Sdr. Kadek Dwindha Yudha Pratama, mahasiswa Program Studi Ilmu Manajemen Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha. Saya telah diberikan penjelasan dan saya mengerti tentang peran saya dalam penelitian ini.



Partisipan,

(.....)

DAFTAR PERTANYAAN

Metode wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada kerangka kerja GCF (*Governance Capacity Framework*), yang merupakan pendekatan indikator diagnostik untuk menilai faktor-faktor yang mempengaruhi tata kelola lingkungan, baik secara positif maupun negatif. GCF terdiri dari tiga dimensi utama: *knowing* (kesadaran dan pengetahuan), *wanting* (kerja sama dan komitmen), dan *enabling* (jaringan dan sumber daya). Masing-masing dimensi ini terbagi lagi menjadi 9 kondisi yang dievaluasi melalui 27 indikator.

Dalam konteks penelitian tata kelola Pemerintahan Desa Baktiseraga sebagai *best practice good governance* di Kabupaten Buleleng, wawancara mendalam akan difokuskan pada pemahaman dan kesadaran para pemangku kepentingan, komitmen mereka terhadap solusi jangka panjang, serta sumber daya dan alat yang mereka miliki untuk mendukung tata kelola yang efektif.

Skala Likert akan digunakan untuk mengukur persepsi responden terhadap setiap indikator guna mengidentifikasi hambatan dan pendukung kapasitas tata kelola yang ada. Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan :

1. Pengetahuan

1.1 Kesadaran

1.1.1 Pengetahuan Masyarakat

Bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat mengenai layanan atau program yang ada di Desa?

1.1.2 Rasa Urgensi Setempat

Sejauh mana pemangku kepentingan lokal mempunyai rasa urgensi layanan dan program yang dilaksanakan Desa?

1.1.3 Internalisasi Perilaku

Sejauh mana masyarakat lokal dan pemangku kepentingan mencoba mengubah layanan dan program-program yang diadakan agar sesuai dengan *Good Governance*?

1.2 Pengetahuan Yang Bermanfaat

1.2.1 Ketersediaan Informasi

Seberapa baik informasi yang berguna layanan dan program yang di bangaun oleh Desa?

1.2.2 Transparansi Informasi

Sejauh mana informasi mengenai layanan dan program desa dapat diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan, termasuk para ahli dan non-ahli?

1.2.3 Kohesi Pengetahuan

Sejauh mana informasi tentang layanan dan program Desa yang bersifat kohesif dalam hal penggunaannya. Menghasilkan dan berbagi berbagai jenis informasi di antara berbagai bidang kebijakan dan pemangku kepentingan?

1.3 Pembelajaran Yang Berkelanjutan

1.3.1 Pemantauan Cerdas

Sejauh mana pemantauan proses layanan dan program Desa mampu dengan cepat mengenali situasi yang mengkhawatirkan, mengidentifikasi tren yang mendasarinya, dan memiliki nilai prediktif?

1.3.2 Evaluasi

Sejauh mana kebijakan dan implementasi terkait layanan dan program Desa saat ini terus dikaji, dievaluasi, dan diperbaiki?

1.3.3 Pembelajaran Lintas Pemangku Kepentingan

Sejauh mana para pemangku kepentingan yang terkait dengan layanan dan program Desa mempunyai kesempatan untuk berinteraksi satu sama lain dan dengan sengaja memilih untuk belajar dari satu sama lain?

2. Keinginan

2.1 Proses Keterlibatan Pemangku Kepentingan

2.1.1 Inklusivitas Pemangku Kepentingan

Sejauh mana semua pemangku kepentingan terkait dapat ikut serta dalam proses pengambilan keputusan mengenai layanan dan program Desa? Apakah proses keterlibatannya transparan dan

apakah para pemangku kepentingan dapat berbicara atas nama kelompok kepentingan mereka?

2.1.2 Perlindungan Nilai-Nilai Inti

Sejauh mana para pemangku kepentingan merasa yakin bahwa nilai-nilai inti mereka tidak akan dirugikan selama keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan layanan dan program Desa?

2.1.3 Kemajuan Dan Beragam Pilihan

Sejauh mana para pemangku kepentingan mempunyai prospek keuntungan selama keterlibatan aktif mereka dalam setiap proses pengambilan keputusan mengenai layanan dan program Desa?

2.2 Ambisi Pengelolaan

2.2.1 Pengelolaan Yang Ambisius Dan Realistis

Sejauh mana tujuan layanan dan program Desa yang ambisius namun realistis (didukung oleh target intermiten yang realistis dan mampu mengatasi ketidakpastian)?

2.2.2 Penyematan Wacana

Sejauh mana ambisi mengenai layanan dan program Desa terjalin dalam konteks sejarah, budaya, normatif, dan politik kota?

2.2.3 Kohesi Kebijakan

Sejauh mana kebijakan-kebijakan tersebut relevan bagi tata kelola layanan dan program Desa dan koheren antar batas geografis, administratif, sektoral, dan tingkat pemerintahan?

2.3 Agen Perubahan

2.3.1 Agen Wirausaha

Sejauh mana wirausahawan agen perubahan mampu memperoleh akses terhadap sumber daya, mencari dan memanfaatkan peluang, serta mempunyai pengaruh dalam pengambilan keputusan mengenai layanan dan program Desa?

2.3.2 Agen Kolaboratif

Sejauh mana pemangku kepentingan dapat terlibat, berkolaborasi, dan menghubungkan pelaku bisnis, pemerintah, dan masyarakat sipil untuk menerapkan layanan dan program Desa?

2.3.3 Agen Visioner

Sejauh mana para aktor visioner mampu secara efektif mendorong dan mengelola strategi terpadu jangka panjang untuk layanan dan program Desa?

3. Pendukung

3.1 Jaringan Multilevel Potensi

3.1.1 Ruang Untuk Bermanuver

Sejauh mana para pemangku kepentingan mempunyai kebebasan dan kesempatan untuk mengembangkan berbagai pendekatan inovatif dan kemitraan yang sesuai dengan tujuan yang dapat mengatasi implementasi layanan dan program Desa?

3.1.2 Pembagian Tanggungjawab Yang Jelas

Sejauh mana tanggung jawab ditentukan dan dialokasikan dengan jelas, agar dapat secara efektif mengatasi penerapan layanan dan program Desa?

3.1.3 Wewenang

Sejauh mana terdapat bentuk kekuasaan dan wewenang yang sah yang memungkinkan pendekatan jangka panjang, terpadu dan berkelanjutan untuk menerapkan layanan dan program Desa?

3.2 Kelayakan Finansial

3.2.1 Keterjangkauan

Sejauh mana layanan dan program Desa tersedia dan terjangkau bagi semua warga negara, termasuk masyarakat termiskin?

3.2.2 Kesiapan Konsumen Untuk Membayar

Bagaimana persepsi pembelanjaan mengenai layanan dan program Desa oleh para pemangku kepentingan terkait?

3.2.3 Kelanjutan Finansial

Sejauh mana pengaturan keuangan mendukung penerapan layanan dan program Desa dalam jangka panjang?

3.3 Kapasitas Pelaksana

3.3.1 Instrumen Kebijakan

Sejauh mana instrumen kebijakan digunakan dan dievaluasi secara efektif, untuk merangsang perilaku yang diinginkan dan mencegah aktivitas dan pilihan yang tidak diinginkan?

3.3.2 Kepatuhan Terhadap Hukum

Sejauh mana para pemangku kepentingan menghormati perjanjian, tujuan, peraturan, dan undang-undang?

3.3.3 Kesiapsiagaan

Sejauh mana kesiapan menghadapi perubahan yang tidak menentu dan tiba-tiba terkait layanan dan program Desa?



DAFTAR PERNYATAAN

Metode survei yang akan digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada prinsip-prinsip dari *Good Governance*, yang terdiri dari Partisipasi, *Rule of Law*, Transparansi, Daya Tanggap, Orientasi pada Konsensus, Keadilan dan Kesetaraan, Efektivitas dan Efisiensi, serta Akuntabilitas.

Dalam konteks penelitian tata kelola Pemerintahan Desa Baktiseraga sebagai *best practice good governance* di Kabupaten Buleleng, survey dilakukan untuk dapat mengetahui dari ke-9 (Sembilan) prinsip yang ada, yang manakah prinsip yang sudah terlaksana dengan baik di Pemerintahan Desa Baktiseraga.

Data Responden :

- Nama : _____
- Usia : _____
- Pendidikan Terakhir : _____
- Pekerjaan : _____
- Alamat : _____

Petunjuk Pengisian :

Mohon berikan penilaian Anda terhadap pernyataan di bawah ini berdasarkan kondisi nyata di Desa Baktiseraga saat ini, dengan memilih salah satu angka pada skala berikut:

- | Skala | Keterangan |
|-------|--|
| 1 | Sangat Tidak Setuju / Belum Terlaksana Sama Sekali |
| 2 | Tidak Setuju / Jarang Terlaksana |
| 3 | Cukup Setuju / Cukup Terlaksana |
| 4 | Setuju / Sering Terlaksana |
| 5 | Sangat Setuju / Selalu Terlaksana |

No	Uraian Pertanyaan	1	2	3	4	5
	PARTISIPASI (<i>Participation</i>)					
1	Pemerintah Desa melibatkan warga (termasuk kelompok perempuan, pemuda, dan minoritas) dalam perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes).					

No	Uraian Pertanyaan	1	2	3	4	5
2	Terdapat ruang atau forum bagi warga untuk memberikan kritik, saran, dan masukan secara bebas terhadap kebijakan desa.					
3	Keputusan penting di desa (contohnya penggunaan Dana Desa) selalu melibatkan musyawarah mufakat atau pengambilan suara dari perwakilan masyarakat.					
	SUPREMASI HUKUM (<i>Rule of Law</i>)					
3	Peraturan desa (Perdes) dan kebijakan yang dibuat tidak memihak dan berlaku adil untuk semua warga.					
4	Jika terjadi masalah atau konflik antar warga, penyelesaiannya selalu didasarkan pada aturan yang jelas dan tidak diskriminatif.					
5	Seluruh aparat desa bertindak sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan, bukan berdasarkan kepentingan pribadi					
	TRANSPARANSI (<i>Transparency</i>)					
6	Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dipublikasikan secara terbuka dan mudah diakses oleh semua warga (contohnya di papan informasi atau media digital).					
7	Proses rekrutmen atau pemilihan perangkat desa/pengelola kegiatan dilakukan secara terbuka dan dapat dipantau oleh warga.					
8	Warga desa mudah mendapatkan informasi mengenai program dan kegiatan yang sedang dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa					
	RESPONSIVITAS (<i>Responsiveness</i>)					

No	Uraian Pertanyaan	1	2	3	4	5
10	Pemerintah Desa merespons dan menindaklanjuti setiap keluhan atau pengaduan warga dengan cepat dan jelas.					
11	Kebutuhan mendesak warga, terutama saat bencana atau keadaan darurat, ditangani dengan tanggap oleh aparat desa.					
12	Proses pengurusan dokumen dan layanan administrasi di kantor desa berlangsung cepat dan tidak berbelit-belit.					
	BERORIENTASI PADA KONSENSUS <i>(Consensus Orientation)</i>					
13	Pemerintah Desa selalu berusaha mencari jalan tengah atau kesepakatan terbaik ketika terjadi perbedaan pendapat antar kelompok di desa.					
14	Kebijakan desa yang dihasilkan mencerminkan keseimbangan kepentingan antara berbagai kelompok, bukan hanya satu kelompok dominan.					
	KESETARAAN DAN INKLUSIVITAS <i>(Equity and Inclusiveness)</i>					
15	Program bantuan atau pemberdayaan di desa disalurkan secara adil dan tidak memandang suku, agama, atau status sosial penerima.					
15	Warga miskin/rentan dan penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses layanan publik dan berpartisipasi dalam kegiatan desa.					
	EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI <i>(Effectiveness and Efficiency)</i>					

No	Uraian Pertanyaan	1	2	3	4	5
16	Program dan proyek pembangunan yang dilaksanakan desa selalu selesai tepat waktu dan sesuai dengan target yang ditetapkan.					
17	Sumber daya desa (dana, waktu, tenaga) digunakan seoptimal mungkin dan tidak ada pemborosan dalam setiap kegiatan					
18	Pelayanan publik yang diberikan oleh aparat desa berkualitas dan benar-benar bermanfaat bagi warga.					
	AKUNTABILITAS (Accountability)					
19	Pemerintah Desa rutin melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil kerja mereka kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan masyarakat.					
20	Jika terjadi penyimpangan atau kesalahan dalam pengelolaan dana desa, aparat yang bertanggung jawab akan menerima sanksi yang sesuai.					
21	Laporan pertanggungjawaban kegiatan mudah dipahami oleh warga biasa.					
	VISI STRATEGIS (Strategic Vision)					
22	Pemerintah Desa memiliki rencana jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/RPJMDes) yang jelas dan realistis untuk masa depan desa.					
23	Keputusan yang diambil hari ini selalu mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan warga dan kelestarian lingkungan.					

No	Uraian Pertanyaan	1	2	3	4	5
24	Aparat desa menunjukkan kepemimpinan yang berwawasan ke depan dan mampu mendorong perubahan positif di desa.					

Pertanyaan Terbuka :

1. Menurut Anda, di antara 9 prinsip di atas, prinsip manakah yang paling menonjol (paling baik pelaksanaannya) di desa Anda saat ini? Sebutkan alasannya!

Prinsip yang Paling Menonjol : _____

Alasan : _____

2. Menurut Anda, prinsip manakah yang pelaksanaannya perlu ditingkatkan atau diperbaiki segera oleh Pemerintah Desa? Sebutkan alasannya dan berikan saran konkret untuk perbaikannya!

Prinsip yang Perlu Ditingkatkan : _____

Alasan dan Saran Perbaikan : _____

3. Secara umum, apa harapan terbesar Anda terhadap cara Pemerintah Desa mengelola urusan publik dalam 3 tahun ke depan?

Lampiran 6 Hasil Wawancara Narasumber I

Mahasiswa

Pertanyaan pertama, sejauh mana efektivitas diseminasi informasi RKPDes di Baktiseraga dalam membangun *civic literacy* (melek warga)? Apakah warga sudah teredukasi bahwa akses terhadap dokumen anggaran adalah hak konstitusional, atau masih dianggap tabu?

Narasumber

Sebagai akademisi yang sering menjadi teman diskusi dalam program-program di Baktiseraga, saya melihat desa ini telah melampaui fase sosialisasi tradisional. Efektivitas diseminasi RKPDes di sini sudah sangat tinggi karena didukung oleh infrastruktur digital yang mapan.

- Transparansi Digital yang Riil, pemanfaatan website desa, media sosial, dan sarana digital lainnya bukan sekadar formalitas. Dokumen anggaran dan program kerja sudah terbuka lebar dan dapat diakses kapan saja oleh warga. Ini adalah langkah konkret pemerintah desa dalam menjemput bola.
- Kesesuaian Demografi, strategi digital ini sangat presisi karena komposisi masyarakat Baktiseraga yang mayoritas pendatang, berpendidikan tinggi, dan merupakan kelas pekerja aktif pengguna internet. Mereka tidak perlu lagi datang ke kantor desa; informasi sudah ada di genggaman mereka.

Terkait dengan persepsi warga mengenai akses anggaran, pandangan saya adalah sebagai berikut:

1. Tabu Telah Usang, di Baktiseraga, konsep bahwa anggaran desa adalah hal yang tabu atau rahasia sudah tidak relevan lagi. Tingkat literasi dan pendidikan warga yang tinggi membuat mereka memandang akses informasi anggaran sebagai hak konstitusional yang absolut. Mereka tidak lagi merasa sungkan atau ewuh pakewuh untuk mengkritisi angka-angka dalam RKPDes.
2. Literasi Warga yang Teruji, dalam berbagai diskusi program desa dan kegiatan konservasi yang saya ikuti, saya melihat warga sangat vokal. Mereka tidak hanya melek informasi, tapi mampu melakukan *check and balance*. Keterbukaan digital desa telah menciptakan iklim di mana warga merasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap anggaran desa.
3. Kualitas Partisipasi, tantangannya kini bukan lagi pada akses, melainkan pada kedalaman diskusi.

Mahasiswa

Pertanyaan kedua, apakah transparansi di Baktiseraga lahir dari *sense of urgency* internal pemerintah desa untuk reformasi, atau lebih karena tekanan eksternal (regulasi/tokoh masyarakat)? Mana yang menjadi *driver* utama perubahan ini?

Narasumber

Menurut pengamatan saya, transparansi di Baktiseraga adalah hasil dari Permintaan Tinggi bertemu dengan Kemauan yang Tinggi.

Saya melihat ada kesadaran mendalam dari internal pemerintah desa bahwa pola kepemimpinan lama tidak akan *survive* menghadapi demografi Baktiseraga.

- Adaptasi Kepemimpinan, perangkat desa menyadari bahwa mereka melayani warga yang mayoritas pendatang, berpendidikan tinggi, dan kelas pekerja aktif internet.
- Kebutuhan akan Legitimasi, di desa dengan tingkat literasi tinggi, satu-satunya cara

pemerintah desa mendapatkan kepercayaan (*trust*) adalah melalui transparansi. Tanpa membuka diri secara digital (website dan medsos), mereka akan terus dicurigai oleh warga yang kritis. Jadi, ada reformasi internal agar mereka tetap relevan.

Tekanan eksternal di sini bukan hanya soal aturan hukum (UU KIP atau UU Desa), tapi lebih kepada tekanan sosial-intelektual:

- Kritisnya Tokoh & Komunitas, kehadiran tokoh masyarakat, akademisi, dan komunitas (termasuk saat kami berdiskusi mengenai program konservasi) menciptakan standar baru. Warga sering bertanya dengan data, sehingga memaksa pemerintah desa untuk selalu siap dengan data yang terbuka.
- Budaya Urban-Migran, masyarakat pendatang cenderung lebih berani menuntut hak konstitusional mereka dibandingkan pola masyarakat agraris tradisional yang mungkin masih sungkan.

Mahasiswa

Mana yang Menjadi Driver Utama?

Narasumber

Jika harus memilih satu, saya berpendapat bahwa Karakter Demografi Warga (Eksternal) adalah *driver* utamanya, yang kemudian memicu Sense of Urgency Internal.

Mahasiswa

Mengapa demikian?

Narasumber

Di banyak desa lain, regulasi yang sama berlaku (tekanan eksternal hukum), namun transparansinya tidak seprogresif Baktiseraga. Mengapa Baktiseraga berbeda? Karena pemerintah desanya merespons dengan cerdas "tekanan" dari warganya yang cerdas pula.

Pemerintah desa Baktiseraga melakukan reformasi digital bukan karena takut disanksi aturan, melainkan karena mereka tahu bahwa warga mereka (yang kelas pekerja dan melek teknologi) tidak akan bisa menerima pola komunikasi yang tertutup.

Mahasiswa

Pertanyaan ketiga, bagaimana Bapak/Ibu menilai kematangan birokrasi desa dalam merespons kritik publik (*public dissent*)? Apakah kritik sudah diinternalisasi sebagai bahan evaluasi konstruktif, atau masih dianggap sebagai gangguan stabilitas?

Narasumber

Secara keseluruhan, saya melihat birokrasi Baktiseraga sudah bertransformasi dari model "birokrasi kekuasaan" menjadi "birokrasi layanan". Kritik publik dianggap sebagai *feedback* pasar (warga) yang harus direspons secara profesional agar kualitas layanan (program desa) terus meningkat.

Mahasiswa

Pertanyaan keempat, dari perspektif komunikasi publik, apakah bauran media (*media mix*) yang digunakan desa—digital maupun konvensional—sudah inklusif menjangkau seluruh strata sosial masyarakat, atau menciptakan *digital divide*?

Narasumber

Saya menilai tidak terjadi *digital divide* yang signifikan di Baktiseraga karena komposisi demografinya memang menuntut digitalisasi. Celah digital biasanya terjadi jika teknologi dipaksakan pada masyarakat yang belum siap, namun di Baktiseraga, teknologi justru menjadi jembatan penghubung bagi warga pendatang agar bisa "hadir" secara digital dalam urusan desa. Poin Penting: Inklusivitas di Baktiseraga bukan berarti

semua informasi diberikan lewat semua media secara sama rata, melainkan ketepatan memilih media untuk profil warga yang tepat. Warga senior terlayani lewat pertemuan banjar, sementara warga pendatang terlayani lewat transparansi digital.

Mahasiswa

Pertanyaan kelima, apakah level granularitas data yang dipublikasikan sudah memenuhi standar *Open Data* yang substantif (hingga satuan harga/RAB), sehingga memungkinkan publik melakukan audit independen?

Narasumber

Baktiseraga telah memenuhi standar *Open Data* yang substantif. Keterbukaan hingga satuan harga bukan lagi dianggap sebagai ancaman, melainkan sebagai cara untuk membangun legitimasi di hadapan warga yang cerdas dan kritis.

Mahasiswa

Pertanyaan keenam, bagaimana dinamika *institutional relations* antara BPD dan Pemerintah Desa? Apakah arus informasi dan data antar kedua lembaga ini berjalan simetris, atau ada asimetri informasi yang menghambat fungsi *checks and balances*?

Narasumber

Asimetri informasi di Desa Baktiseraga sangat minim. Kematangan administratif dan keterbukaan informasi publik telah menjadi "jembatan" yang memastikan arus data antara Pemerintah Desa dan BPD berjalan lancar. Hal ini membuat fungsi *checks and balances* berjalan secara substantif di mana kebijakan tidak hanya diawasi secara formalitas, tapi benar-benar diuji secara logika teknokratis.

Mahasiswa

Pertanyaan ketujuh, apakah mekanisme *feedback loop* desa sudah berjalan sistematis? Bagaimana akuntabilitas desa dalam menjelaskan trade-off kebijakan kepada warga yang usulannya tidak terakomodasi?

Narasumber

Kematangan birokrasi di Baktiseraga terlihat dari pergeseran gaya komunikasinya: dari yang semula bersifat "instruksi otoritas" menjadi "edukasi kebijakan".

Warga pendatang yang kritis di Baktiseraga pada umumnya bisa menerima jika usulannya tidak terakomodasi, *asalkan* alasannya logis, adil, dan didasarkan pada data yang transparan. Inilah yang saya lihat sedang dipraktikkan oleh kepemimpinan desa saat ini—membangun kepercayaan melalui penjelasan *trade-off* yang rasional.

Akuntabilitas di Baktiseraga bukan berarti menyenangkan semua orang, tetapi memastikan semua orang paham mengapa suatu keputusan diambil.

Mahasiswa

Pertanyaan kedelapan, sejauh mana pelibatan masyarakat dalam fase *Post-Implementation Review*? Apakah ada ruang bagi audit sosial yang partisipatif, atau evaluasi hanya berjalan satu arah dari pemerintah?

Narasumber

Pelibatan masyarakat dalam fase pasca-implementasi di Baktiseraga sudah berjalan cukup substantif. Evaluasi tidak lagi bersifat satu arah (hanya laporan internal pemerintah desa ke pemerintah daerah), melainkan sudah menjadi budaya organisasi yang melibatkan warga sebagai "pemegang saham" desa.

Kematangan administratif yang didukung oleh keterbukaan akses data telah memungkinkan warga untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga menjadi pengawas yang aktif dan cerdas dalam setiap tahap pembangunan desa.

Mahasiswa

Pertanyaan kesembilan, bagaimana Bapak/Ibu melihat peran ruang-ruang informal (*informal sphere*) seperti warung kopi atau banjar dalam proses formulasi kebijakan desa? Apakah aspirasi informal ini berhasil ditranslasi menjadi kebijakan formal?

Narasumber

Di Baktiseraga, ruang informal bukan sekadar tempat mengobrol, melainkan laboratorium kebijakan. Aspirasi informal berhasil ditranslasi menjadi kebijakan formal bukan karena kebetulan, melainkan karena adanya kemauan birokrasi untuk mendengarkan dan adanya ketersediaan data untuk memproses aspirasi tersebut secara profesional.

Mahasiswa

Pertanyaan kesepuluh, apakah forum Musrenbang di Baktiseraga sudah bebas dari fenomena *Elite Capture* (pembajakan elit)? Bagaimana tingkat representasi kelompok marginal/non-elit dalam forum strategis tersebut?

Narasumber

Meskipun risiko *elite capture* tidak pernah benar-benar nol di sistem mana pun, Baktiseraga telah berhasil menekan risiko tersebut ke level minimal.

Poin Utama: Keberhasilan Baktiseraga bukan terletak pada ketiadaan elit, melainkan pada sistem yang memaksa elit untuk bekerja berdasarkan aspirasi basis. Dengan mekanisme pengumpulan ide yang partisipatif di fase pra-musrenbang, forum Musrenbang akhirnya berubah dari sekadar ajang "ketok palu" menjadi forum deliberasi yang transparan.

Kematangan administratif dan keterbukaan informasi yang dimiliki kepemimpinan saat ini menjadi jaminan bahwa hasil Musrenbang adalah cerminan dari kebutuhan kolektif masyarakat Baktiseraga yang heterogen.

Mahasiswa

Pertanyaan kesebelas, dalam konteks sosiologis desa, apakah *civic space* (ruang sipil) cukup aman bagi warga yang bersikap kritis (*whistleblowers*)? Apakah ada perlindungan sosial atau justru sanksi sosial bagi mereka?

Narasumber

Di Baktiseraga, keamanan bagi warga kritis dijamin oleh sistem yang terbuka dan masyarakat yang rasional. Kritik dipandang sebagai kontribusi, bukan pengkhianatan. Selama kritik disampaikan dengan etika dan data, sanksi sosial hampir tidak memiliki ruang untuk tumbuh di sini.

Mahasiswa

Pertanyaan kedua belas, bagaimana rasionalitas desa dalam penentuan prioritas anggaran di tengah keterbatasan fiskal? Apakah keputusan alokasi murni berbasis teknokratis-kebutuhan, atau terdistorsi oleh intervensi politik supradesa (titipan)?

Narasumber

Rasionalitas anggaran di Baktiseraga saya nilai berada pada level Teknokratis-Partisipatif. Meskipun ada dinamika politik dengan level pemerintahan di atasnya, driver utamanya tetaplah kebutuhan warga yang telah terfiltrasi melalui sistem administratif yang rapi.

Di Baktiseraga, data bukan hanya alat hitung, tapi alat politik untuk memastikan bahwa anggaran benar-benar kembali ke masyarakat dalam bentuk program yang substantif, bukan sekadar untuk memenuhi syahwat politik pihak tertentu.

Mahasiswa

Pertanyaan ketiga belas, apakah visi 'Desa Digital' yang dicanangkan merupakan target ambisius yang didukung *roadmap* realistis dan terukur, atau sekadar jargon politik tanpa pijakan implementasi yang kuat?

Narasumber

Visi Desa Digital di Baktiseraga adalah target ambisius yang dikawal oleh *roadmap* yang realistis. Hal ini terbukti dari keterbukaan informasi yang sudah kita rasakan manfaatnya saat ini. Kepemimpinan sekarang telah berhasil mengubah jargon menjadi sistem yang operasional, yang sangat membantu kami sebagai akademisi dan praktisi dalam berkolaborasi membangun desa.

Mahasiswa

Pertanyaan keempat belas, bagaimana integrasi nilai *local wisdom* (Menyama Braya/Awig-awig) dengan prinsip transparansi modern? Apakah adat berfungsi sebagai modal sosial yang memperkuat akuntabilitas, atau justru menjadi penghambat?

Narasumber

Di Baktiseraga, adat dan transparansi modern adalah dua sisi mata uang. Adat memberikan nilai dan etika, sementara transparansi memberikan metode dan bukti. Sinkronisasi yang kuat antara desa dinas dan desa adat di bawah kepemimpinan saat ini telah membuktikan bahwa kearifan lokal adalah mesin utama bagi terciptanya akuntabilitas yang berkelanjutan.

Mahasiswa

Pertanyaan kelima belas, secara regulasi, apakah terdapat konsistensi dan sinkronisasi antara visi politik Kepala Desa dengan mandat UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP)? Adakah *policy gap* di level implementasi?

Narasumber

Di Baktiseraga, politik dan regulasi berjalan beriringan. Visi Kepala Desa tidak menabrak UU KIP, justru menjadikannya sebagai instrumen untuk meraih kepercayaan warga pendatang yang kritis. Poin Kunci: *Policy gap* yang ada di Baktiseraga bukan bersifat substantif (niat menyembunyikan data), melainkan bersifat teknis-administratif. Kepemimpinan saat ini telah berhasil menutup celah terbesar dalam transparansi desa, yaitu hambatan mentalitas birokrasi yang tertutup. Dengan kematangan administratif yang ada, saya optimistis celah teknis ini akan terus mengecil seiring dengan penguatan sistem digital desa.

Mahasiswa

Pertanyaan keenam belas, siapakah aktor-aktor kunci (*policy entrepreneurs*) di desa ini yang secara konsisten mendorong inovasi anggaran? Bagaimana posisi tawar mereka di hadapan struktur birokrasi desa?

Narasumber

Policy entrepreneurs di Baktiseraga berhasil karena mereka bekerja dalam ekosistem yang saling mendukung. Kepala Desa memberikan payung politik, perangkat desa memberikan eksekusi teknis, dan akademisi/warga memberikan tekanan intelektual. Inilah yang memastikan inovasi anggaran di Baktiseraga memiliki pijakan yang sangat kokoh.

Mahasiswa

Pertanyaan ketujuh belas, apakah ada peran intermediari (seperti akademisi atau LSM) yang berfungsi 'menerjemahkan' data teknis pemerintah agar dapat dikonsumsi publik, guna meningkatkan partisipasi bermakna?

Narasumber

Di Baktiseraga, pemerintah desa menyediakan bahannya (data), namun para intermediari menyediakan alat makannya (pemahaman). Tanpa aktor intermediari, transparansi digital berisiko hanya menjadi tumpukan data mati yang tidak menghasilkan aksi sosial.

Mahasiswa

Pertanyaan kedelapan belas, terkait isu keberlanjutan (*sustainability*), apakah inovasi tata kelola ini sudah terlembaga (*institutionalized*) dalam regulasi desa (Perdes) yang kuat, sehingga sistem tetap berjalan siapapun pemimpinnya nanti?

Narasumber

Di Baktiseraga, inovasi tata kelola sudah dalam proses pelembagaan yang sangat kuat. Melalui kombinasi antara Peraturan Desa (Legal), Infrastruktur Digital (Teknis), dan Harmonisasi Adat (Sosial), Baktiseraga telah membangun fondasi yang cukup kokoh agar sistem transparansi ini tetap tegak berdiri siapapun yang memegang tampuk kepemimpinan ke depan.

Mahasiswa

Pertanyaan kesembilan belas, seberapa tinggi tingkat *agility* (kelincahan) organisasi pemerintah desa dalam mengadopsi inovasi *bottom-up*? Apakah birokrasi desa bersifat fasilitatif atau justru rigid terhadap ide-ide baru dari staf/warga?

Narasumber

Yang menarik dari Baktiseraga adalah kelincahan (*agility*) mereka tidak mengorbankan kepatuhan terhadap regulasi. Mereka sangat cerdas dalam menyeimbangkan kreativitas dengan ketertiban administratif. Meskipun gesit dalam mengadopsi ide baru, setiap inovasi tetap dipayungi oleh dasar hukum dan administrasi yang matang. Inilah yang saya sebut sebagai "Kelincahan yang Bertanggung Jawab". Mereka kreatif dalam cara kerja, namun tetap disiplin dalam pelaporan data. Tingkat *agility* Pemerintah Desa Baktiseraga sangat tinggi karena birokrasinya telah bertransformasi dari model "penjaga gerbang" (*gatekeeper*) menjadi "fasilitator inovasi". Hal ini membuat ide-ide dari bawah tidak menguap begitu saja, melainkan terproses menjadi kebijakan publik yang solutif dan tepat sasaran.

Mahasiswa

Pertanyaan kedua puluh, apakah struktur organisasi desa sudah mencerminkan manajemen modern dengan spesialisasi tugas (Tupoksi) yang jelas dalam pengelolaan informasi, atau masih tumpang tindih (*overlapping*)?

Narasumber

Struktur organisasi Desa Baktiseraga sudah sangat modern dan profesional. Spesialisasi tugasnya jelas, terutama dalam pengelolaan informasi publik. Kejelasan tupoksi ini menjadi fondasi utama mengapa transparansi anggaran dan digitalisasi layanan di desa ini bisa berjalan dengan konsisten dan minim kesalahan administratif.

Mahasiswa

Pertanyaan kedua puluh satu, bagaimana efektivitas mekanisme *internal control* dan penegakan disiplin aparatur? Apakah ada preseden pemberian sanksi administratif bagi perangkat yang menghambat akses informasi publik?

Narasumber

Dengan Kepala Desa yang memiliki latar belakang auditor BPKP, Desa Baktiseraga memiliki sistem pertahanan internal yang sangat kuat. Penegakan disiplin bukan lagi berdasarkan rasa suka atau tidak suka, melainkan berdasarkan kepatuhan pada standar

(compliance). Hal inilah yang menjamin bahwa transparansi informasi di Baktiseraga bukan sekadar komitmen lisan, melainkan sistem yang terawasi secara ketat.

Mahasiswa

Pertanyaan kedua puluh dua, apakah partisipasi warga masih digerakkan oleh semangat voluntarisme (gotong royong), atau sudah bergeser menjadi partisipasi transaksional yang mengharapkan insentif finansial ('uang duduk')?

Narasumber

Ada tiga pilar yang menurut saya menjaga semangat voluntarisme di Baktiseraga tetap tinggi:

1. Inovasi sebagai Stimulus: Inovasi desa yang mempermudah hidup warga membuat mereka merasa dihargai. Warga yang dihargai secara sistem akan membalasnya dengan partisipasi yang tulus.
2. Transparansi Radikal: Karena warga tahu ke mana setiap rupiah anggaran dialokasikan (lewat data granular yang terbuka), mereka tidak lagi curiga. Rasa percaya ini adalah bahan bakar utama voluntarisme.
3. Kualitas Dialog: Pertemuan-pertemuan di desa bukan lagi ajang formalitas, tapi ruang diskusi substantif. Warga merasa suara mereka benar-benar menentukan kebijakan, sehingga mereka merasa perlu untuk "hadir" secara penuh tanpa mengharap imbalan uang.

Kesimpulan: Partisipasi di Baktiseraga telah berevolusi dari voluntarisme tradisional menjadi Partisipasi Kewargaan yang Sadar (*Conscious Civic Engagement*). Hal ini bukan terjadi karena kebetulan, melainkan hasil dari sistem pelayanan yang profesional dan kepemimpinan yang mampu membuktikan bahwa program desa adalah solusi nyata bagi masalah warga.

Mahasiswa

Pertanyaan kedua puluh tiga, bagaimana Bapak/Ibu mengukur *Willingness to Participate* masyarakat? Apakah transparansi anggaran berkorelasi positif dengan kerelaan warga mengorbankan waktu/tenaga (swadaya) untuk desa?

Narasumber

Partisipasi masyarakat yang sangat tinggi di Baktiseraga adalah hasil dari "Transparansi yang Memberdayakan". Warga rela berkontribusi bukan karena paksaan, melainkan karena mereka melihat adanya integritas pada kepemimpinan (terutama dengan latar belakang audit beliau) dan kemanfaatan pada setiap program yang dijalankan.

Mahasiswa

Pertanyaan kedua puluh empat, dari analisis postur APBDes, apakah alokasi anggaran operasional sistem informasi mencerminkan komitmen keberlanjutan jangka panjang, atau pos ini rentan dipangkas (*vulnerable*)?

Narasumber

Alokasi anggaran operasional sistem informasi di Baktiseraga **sangat stabil dan tidak rentan**. Komitmen keberlanjutannya tecermin dari cara desa mengonversi sistem informasi menjadi sebuah ekosistem yang bernilai ekonomi melalui BUMDesa dan kemitraan. Ini adalah model *Good Village Governance* yang sangat modern, di mana transparansi digital dibiayai oleh kemandirian ekonomi desa itu sendiri.

Mahasiswa

Pertanyaan kedua puluh lima, apakah Desa memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan SOP penanganan aduan yang terukur (berbasis waktu)? Bagaimana responsivitas sistem terhadap *public complaint*?

Narasumber

1. Responsivitas Berbasis Budaya Pelayanan (*Service Excellence*)

Di Baktiseraga, meskipun mungkin tidak selalu ada "jam digital" yang menghitung detik demi detik pelayanan di papan pengumuman, efektivitasnya sangat dirasakan warga. Hal ini terjadi karena:

- Komunikasi Personal yang Unggul: Perangkat desa memiliki kemampuan komunikasi personal yang sangat baik. Pelayanan tidak terasa kaku atau birokratis. Pendekatan yang humanis ini membuat warga merasa didengarkan, sehingga proses penyelesaian masalah menjadi lebih cair dan cepat.
- Efisiensi Tanpa Sekat: Karena koordinasi antarperangkat sudah sangat solid (didukung oleh sistem digital internal), sebuah aduan atau permohonan layanan bisa diproses secara paralel. Warga seringkali terkejut dengan kecepatan penyelesaian urusan yang biasanya memakan waktu lama di tempat lain.

2. SOP yang Terinternalisasi (Implisit namun Efektif)

Meskipun tidak selalu ditampilkan secara eksplisit dalam bentuk target waktu (seperti "5 menit selesai"), saya melihat ada SOP yang sudah mendarah daging dalam perilaku aparatur:

1. Kecepatan Respon Digital: Lewat grup WhatsApp banjar atau kanal media sosial, perangkat desa sangat responsif. Keluhan yang masuk biasanya langsung ditanggapi dalam waktu singkat, memberikan kepastian kepada warga bahwa masalah mereka sedang ditangani.
2. Responsivitas terhadap Kebutuhan Riil: Karena program desa sangat menyentuh kebutuhan harian, perangkat desa merasa memiliki tanggung jawab moral untuk segera menyelesaikan kendala yang muncul. Kepuasan warga menjadi indikator kinerja yang jauh lebih kuat daripada sekadar pemenuhan standar waktu formal.

3. Kepuasan Warga sebagai Ukuran Keberhasilan

Dalam perspektif manajemen modern, ukuran keberhasilan tertinggi bukan hanya pada ketepatan waktu (*time-based*), melainkan pada kepuasan pengguna (*outcome-based*).

- Audit Sosial Spontan: Di tengah masyarakat yang kritis, jika pelayanan melambat, warga pasti akan segera bersuara. Fakta bahwa tingkat kepuasan warga sangat tinggi menunjukkan bahwa "standar waktu" yang tidak tertulis tersebut sebenarnya berjalan sangat cepat.
- Peran Kepemimpinan: Latar belakang Kepala Desa yang disiplin memastikan bahwa birokrasi tidak "tidur". Beliau membangun sistem di mana setiap perangkat desa merasa malu jika memberikan pelayanan yang lambat atau tidak memuaskan. Kesimpulannya bahwa baktiseraga membuktikan bahwa kualitas SDM dan komunikasi yang baik jauh lebih efektif daripada sekadar memasang papan SOP yang kaku namun tidak berjiwa. Responsivitas sistem terhadap *public complaint* sangat tinggi karena setiap perangkat desa memandang pelayanan bukan sebagai beban administratif, melainkan sebagai bentuk dedikasi kepada masyarakat.

Mahasiswa

Pertanyaan kedua puluh enam, bagaimana tingkat kepatuhan desa terhadap kewajiban pelaporan (LPJ)? Apakah pemenuhan kewajiban ini bersifat administratif semata atau memenuhi prinsip akuntabilitas publik yang tepat waktu?

Narasumber

Tingkat kepatuhan LPJ di Baktiseraga sangat tinggi dan bersifat substantif. Pemenuhan kewajiban ini tidak lagi bersifat administratif semata, melainkan telah menjadi

instrumen akuntabilitas publik yang transparan dan tepat waktu. Sinergi antara kepemimpinan berbasis audit dan masyarakat yang cerdas telah menciptakan standar emas dalam pelaporan keuangan desa.

Mahasiswa

Pertanyaan kedua puluh tujuh, mengevaluasi manajemen krisis (seperti pandemi), seberapa tangguh (*resilient*) tata kelola keuangan desa dalam melakukan diskresi anggaran darurat secara cepat namun tetap akuntabel?

Narasumber

Tata kelola keuangan Desa Baktiseraga sangat tangguh (*resilient*) karena dibangun di atas sistem, bukan sekadar intuisi. Diskresi anggaran dilakukan dengan kecepatan yang tetap terkendali oleh standar akuntabilitas yang tinggi. Pengalaman krisis membuktikan bahwa kematangan digital dan transparansi yang selama ini dibangun adalah investasi terbaik untuk menghadapi situasi yang tidak terduga.



Lampiran 7 Hasil Wawancara Narasumber 2

Mahasiswa

Pertanyaan pertama, Berdasarkan evaluasi DPMD, apakah sosialisasi dokumen RKPDes di Baktiseraga sudah memenuhi standar minimal kepatuhan (wajib tahu) bagi warga, atau hanya sekedar formalitas administrasi?

Narasumber

Wajib tahu, bagi warga atau hanya sekedar formalitas administrasi. Sosialisasi dokumen RKPDes di Baktiseraga, menurut saya sudah memenuhi standar. Wajib tahu, hal ini berdasarkan pengundangan dari dokumen RKPDes yang ditetapkan sebagai peraturan desa oleh sekretaris desa, sehingga wajib diketahui oleh seluruh warga desa Baktiseraga.

Mahasiswa

Yang selanjutnya, menurut penilaian Dinas, apakah inisiatif transparansi di Baktiseraga ini murni didorong oleh kesadaran internal desa, atau lebih karena tekanan regulasi dari Kabupaten?

Narasumber

Menurut saya, transparansi di Baktiseraga ini murni didorong oleh kesadaran internal desa sebagai wujud pertanggung jawaban integritas seluruh aparatur pemerintah desa terhadap peraturan perundangan yang sudah diberlaku atau yang ditetapkan.

Mahasiswa

Pertanyaan ketiga, bagaimana catatan DPMD terkait responsivitas aparatur desa Baktiseraga saat menghadapi aduan atau kritik warga? Apakah mereka cenderung kooperatif atau defensif saat dibina?

Narasumber

Menurut catatan DPMD terkait reponsivitas aparatur Desa Baktiseraga, ini sudah berjalan dengan baik. Pemerintah desa atau aparatur perangkat desa Baktiseraga sudah dapat merespon segala aduan atau kritik warga dengan baik yang disampaikan melalui ketua RT, ataupun secara bertingkat melalui kelian banjir dinas ataupun melalui website-website ataupun media sosial yang sudah disosialisasikan oleh pemerintah desa Baktiseraga.

Mahasiswa

Pertanyaan keempat, Apakah saluran publikasi yang digunakan desa Website/Baliho sudah dinilai efektif oleh DPMD dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat sesuai Permendes?

Narasumber

Saluran publikasi yang digunakan oleh DPMD sejauh ini sudah berjalan dengan baik, namun dirasa kurang sedikit efektif dikarenakan masih adanya materi-materi kegiatan yang belum rutin diupdate melalui website-website yang sudah dibuat. Begitupun dengan aktivitas-aktivitas yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa, ini kurang banyak diketahui oleh masyarakat meskipun seutuhnya, sepenuhnya sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa Baktiseraga.

Mahasiswa

Pertanyaan kelima, terkait kedalaman data, apakah DPMD mendorong desa untuk membuka data hingga level Rincian Anggaran Biaya (RAB) per kegiatan, atau cukup pagu globalnya saja yang dipublikasikan?

Narasumber

Terkait kedalaman data yang dipublikasikan oleh pemerintah desa hanya merupakan

pagu global saja. Hal ini dapat dilihat melalui pertanggung jawaban balihu yang sudah dibuat oleh pemerintah desa yang hanya memuat pagu global saja Namun, tetap terbuka ruang untuk berdiskusi dari segala lapisan masyarakat ke pemerintah desa apabila ada hal-hal yang dirasa kurang tepat atau perlu dikonsultasikan lebih lanjut terkait dengan rincian RAB perkegiatan ataupun pertanggung jawaban kegiatan yang dikelola oleh pemerintah desa Baktiseraga.

Mahasiswa

Pertanyaan keenam, bagaimana evaluasi DPMD terhadap hubungan kerja antara BPD dan Perbekel di Baktiseraga? Apakah fungsi check and balances berjalan seimbang atau terjadi dominasi salah satu pihak?

Narasumber

Menurut evaluasi DPMD terhadap hubungan kerja antara BPD dengan perbekel di Desa Baktiseraga sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dengan kelancaran-kelancaran dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa. Meliputi penyepakatan peraturan desa dan juga kegiatan-kegiatan lainnya yang melibatkan BPD di Desa Baktiseraga.

Mahasiswa

Pertanyaan ketujuh, Apakah dalam verifikasi APBDes, DPMD memastikan adanya mekanisme umpan balik tertulis bagi usulan masyarakat yang tidak terakomodasi agar tidak menimbulkan gejolak?

Narasumber

Menurut pandangan kami, dalam hal verifikasi APBDes dilaksanakan di level kecamatan. Namun, mekanisme umpan balik tertulis bagi usulan masyarakat tentunya ruang terbuka sangat lebar untuk masyarakat dapat memberikan saran, masukan, ataupun kritik demi penyempurnaan APBDes yang bertujuan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat

Mahasiswa

Pertanyaan kedelapan, saat monitoring fisik, apakah DPMD menemukan bukti pelibatan masyarakat dalam audit kualitas bangunan, atau pelaporan hanya dilakukan sepihak oleh TPK (Tim Pelaksana Kegiatan)?

Narasumber

Saat monitoring kegiatan fisik memang dilaksanakan hanya berdasarkan laporan sepihak koleh pihak TPK, pelibatan masyarakat dilaksanakan dalam kapasitas pembangunan pekerjaan fisik melalui program PKTD atau Padat Karya Tunai ataupun program-program swadaya lainnya.

Mahasiswa

Kemudian pertanyaan kesembilan, apakah DPMD mengakui hasil jaring aspirasi dari forum informal seperti paruman banjar pertemuan warung kopi sebagai dasar penyusunan RKPDes yang sah?

Narasumber

PMD tidak mengakui hasil jaring aspirasi dari forum informal, penyusunan RKPDes dinyatakan sah melalui forum musyawarah desa yang difasilitasi oleh BPD melalui forum musyawarah desa yang dilaksanakan melalui undangan-undangan yang disampaikan oleh BPD kepada segala unsur lapisan masyarakat seperti perwakilan tokoh perempuan, perwakilan pemuda, kemudian perwakilan masyarakat marginal yang melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa Baktiseraga.

Mahasiswa

Pertanyaan kesepuluh Dari laporan pelaksanaan Musrenbangdes yang masuk ke Dinas, apakah tingkat kehadiran kelompok perempuan dan masyarakat miskin sudah memenuhi kuota representatif?

Narasumber

Tingkat kehadiran kelompok perempuan dan masyarakat miskin sudah memenuhi kuota representative. Hal ini dapat dilihat melalui daftar kehadiran dari undangan musyawarah desa yang Sudah dilaksanakan oleh Pemerintah desa Baktiseraga.

Mahasiswa

Pertanyaan ke sebelas, bagaimana mekanisme perlindungan yang disiapkan DPMD jika ada warga/perangkat desa yang melaporkan dugaan penyimpangan atau *whistleblower* agar tidak dikucilkan di desanya?

Narasumber

Mekanisme perlindungan yang disiapkan DPMD dimulai dari pencegahan seperti contohnya ketika ada pelaporan dari U=unsur masyarakat ataupun perangkat desa yang melaporkan apabila adanya dugaan penyimpangan Maka hal ini dilakukan di ruangan yang sifatnya tertutup dan tidak melibatkan pihak-pihak yang tidak terkait kerahasiaan identitas pelapor Juga dijaga sehingga meminimalisir adanya pengucilan yang dilakukan oleh warga desa oleh pelapor.

Mahasiswa

Pertanyaan ke duabelas, dalam evaluasi APBDes, bagaimana DPMD menilai prioritas belanja desa Baktiseraga? Apakah lebih berat ke infrastruktur fisik atau pemberdayaan ekonomi masyarakat?

Narasumber

Dalam evaluasi APBDES, DPMD memandang prioritas belanja desa sudah berjalan seimbang antara pembangunan Infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang memiliki porsi yang seimbang

Mahasiswa

Pertanyaan ke tiga belas, apakah visi 'Desa Digital' Baktiseraga dinilai realistis oleh DPMD dengan kapasitas SDM yang ada, atau hanya sekadar wacana ambisius tanpa dukungan teknis?

Narasumber

Visi desa digital Kami menilai Ini adalah suatu program atau visi yang sangat realistis, hal ini bisa dilihat dengan adanya kerjasama dari pihak desa Baktiseraga dengan berbagai unsur ataupun lembaga pendidikan ataupun pihak ketiga yang ikut mengembangkan aplikasi-aplikasi yang dipergunakan oleh Pemerintah desa Baktiseraga.

Mahasiswa

Pertanyaan ke empat belas, sejauh mana DPMD mengatur sinkronisasi antara Desa Dinas dan Desa Adat (Awig-awig) dalam pengawasan keuangan desa agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan?

Narasumber

Hal ini dapat dilihat Jika DPMD diundang sebagai narasumber dalam forum-forum desa dan juga rapat-rapat lainnya. Maka dilaksanakan sosialisasi-sosialisasi terkait dengan pengolahan keuangan antara desa dinas dan desa adat, agar tidak terjadi tumpang tindih atau dobel anggaran Dalam suatu pelaksanaan kegiatan yang sifatnya sama.

Mahasiswa

Pertanyaan ke lema belas, apakah Perdes Keterbukaan Informasi di Baktiseraga sudah selaras dengan Perbup/Perda Kabupaten, atau masih perlu harmonisasi hukum?

Narasumber

Peraturan desa keterbukaan informasi di Baktiseraga sudah berjalan selaras dengan Perda atau peraturan kabupaten. Hal ini dapat dilihat sebelum disahkannya perdes, maka perlu dilakukan harmonisasi Atau verifikasi melalui bidang terkait di dinas pemberdayaan masyarakat dan desa.

Mahasiswa

Pertanyaan ke enam belas, apakah DPMD melihat adanya ketergantungan pada sosok figur tertentu (One Man Show) di Baktiseraga, atau sistem inovasinya sudah berjalan kolektif?

Narasumber

Menurut pengamatan DPMD, tidak ada ketergantungan pada sosok figur tertentu Di desa Baktiseraga. Pemerintahan desa di Baktiseraga sudah berjalan efektif selaras dan seimbang. Dengan melibatkan berbagai pihak seperti perbekal dalam pemerintahan desa dan juga BPD Seluruh stakeholder terkait Di desa Baktiseraga, dalam proses perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan di desa Baktiseraga.

Mahasiswa

Pertanyaan ke tujuh belas, bagaimana penilaian Dinas terhadap peran Pendamping Desa dalam membantu menerjemahkan data teknis pemerintah agar mudah dipahami warga?

Narasumber

Peran pendamping desa Di desa Baktiseraga sudah berjalan dengan baik. Hal ini bisa dilihat dengan intensitas kedatangan pendamping desa Atau pendamping lokal desa. Dalam melakukan pendampingan Pendampingan terhadap pengelolaan Dana desa Di desa Baktiseraga dan juga pelibatan pendamping desa dalam forum-forum musyawarah Desa Baktiseraga.

Mahasiswa

Pertanyaan ke delapan belas, untuk menjamin keberlanjutan (sustainability) saat ganti Kepala Desa nanti, apakah inovasi tata kelola ini sudah dikunci dalam RPJMDes atau Perdes?

Narasumber

Tentunya untuk menjamin keberlanjutan *sustainability* saat ganti kepala desa, seluruh inovasi ini harus sudah disepakati dalam forum-forum saat penyusunan RPJMDes dan peraturan-peraturan desa lainnya, terkait dengan pembangunan perencanaan Desa .

Mahasiswa

Pertanyaan ke sembilan belas, Apakah struktur organisasi (SOTK) di Baktiseraga dinilai cukup fleksibel untuk mengakomodasi inovasi layanan baru, atau terhambat birokrasi kaku?

Narasumber

Struktur organisasi di desa Baktiseraga dan juga struktur organisasi di desa lainnya se-kabupaten Buleleng Ini sudah sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri, sehingga sudah dinilai cukup fleksibel untuk mengakomodasi seluruh layanan-layanan dan menunjang dalam segala kegiatan di pemerintahan Di desa Baktiseraga.

Mahasiswa

Pertanyaan ke dua puluh, apakah DPMD sudah memverifikasi SK PPID Desa? Apakah petugas tersebut memiliki kompetensi teknis yang memadai atau hanya formalitas nama?

Narasumber

Menurut pengamatan kami, PPID bukan merupakan tupoksi dari dinas PMD, melainkan tupoksi dari dinas Kominfosanti Kabupaten Buleleng.

Mahasiswa

Menyambung dengan pertanyaan ke dua puluh satu, . Pernahkah DPMD memberikan sanksi administratif atau teguran kepada Pemdes Baktiseraga terkait keterlambatan atau penyembunyian informasi publik?

Narasumber

Berkaitan dengan pertanyaan ke dua puluh, bahwa PPID merupakan tupoksi dari dinas Kominfosanti sehingga pembinaan-pembinaan yang sifatnya penyimpangan dilakukan oleh dinas Kominfosanti Kabupaten Buleleng.

Mahasiswa

Pertanyaan ke dua puluh dua, apakah penganggaran untuk operasional rapat/musyawarah desa (uang duduk) di Baktiseraga masih dalam batas kewajaran standar biaya masukan Kabupaten?

Narasumber

Menurut pengamatan kami, musyawarah desa yang sifatnya perencanaan yang difasilitasi oleh BPD seperti musyawarah-musyawarah perencanaan pembangunan desa tidak mendapatkan uang duduk atau uang transportasi. Musyawarah yang sifatnya bagi hasil BUMDES ini diatur lebih lanjut dalam aturan-aturan terkait dengan pelaksanaan musyawarah BUMDES di desa Baktiseraga.

Mahasiswa

Pertanyaan ke dua puluh tiga, berdasarkan data realisasi, bagaimana tren partisipasi swadaya masyarakat baik uang atau tenaga di Baktiseraga? Apakah transparansi berkorelasi dengan kenaikan swadaya?

Narasumber

Menurut pengamatan kami, tren partisipasi swadaya masyarakat atau uang tenaga di Baktiseraga ini diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati tentang standar harga maksimal dan juga ditetapkan kembali oleh peraturan desa tentang standar harga desa yang merupakan acuan dari peraturan bupati tentang standar satuan harga di Kabupaten Buleleng.

Mahasiswa

Pertanyaan ke dua puluh empat, apakah DPMD mendukung penganggaran dana besar untuk pemeliharaan sistem informasi/website desa sebagai prioritas, atau justru sering dicoret saat verifikasi?

Narasumber

DPMD pada intinya mendukung penganggaran untuk pemeliharaan sistem informasi website desa sebagai program prioritas sepanjang program prioritas tersebut sudah tercantum sebagai program prioritas dalam perencanaan-perencanaan pembangunan desa dan mendapatkan persetujuan dalam forum musyawarah desa.

Mahasiswa

Pertanyaan ke dua puluh lima, Apakah Desa Baktiseraga memiliki SOP Layanan Aduan yang terstandarisasi atau ada batas waktu penyelesaian yang telah dilaporkan ke Dinas?

Narasumber

Menurut pemahaman kami, desa Baktiseraga belum memiliki SOP layanan aduan yang terstandarisasi yang telah dibuat. Layanan aduan hanya disampaikan melalui pengaduan

langsung ke pemerintah desa ataupun melalui media sosial dan segera ditindaklanjuti oleh aparat terkait tanpa memiliki standar batas waktu yang jelas.

Mahasiswa

Pertanyaan ke dua puluh enam, bagaimana tingkat kepatuhan Desa Baktiseraga dalam ketepatan waktu pelaporan LPJ Tahunan dan penginputan Siskeudes?

Narasumber

Tingkat kepatuhan desa Baktiseraga dalam pelaporan LPJ dan penumpukan SISKUDES sudah dinilai sangat baik.

Mahasiswa

Pertanyaan ke dua puluh tujuh, bagaimana hasil evaluasi DPMD terkait akuntabilitas penggunaan Dana Darurat (BTT) di Baktiseraga? Apakah administrasinya tertib meski dalam situasi mendesak?

Narasumber

Administrasinya tertib meski dalam situasi mendesak, menurut pengamatan kami, akuntabilitas penggunaan dana darurat BTT di desa Baktiseraga sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan Permendagri tentang mengenai pengelolaan keuangan desa.



Lampiran 8 Hasil Wawancara Narasumber 3

Mahasiswa

Ajik, biasanya tahu dari mana kalau desa mulai menyusun rencana anggaran tahunan? Apakah ada info khusus yang sampai ke kelompok pedagang soal jatah anggaran untuk ekonomi?

Narasumber

Sejujurnya, saya kurang begitu paham karena saya adalah pelaku UMKM di bidang kreatif (jasa), bukan UMKM pedagang di area desa. Jadi, saya kurang paham dengan kondisi teknisnya seperti apa.

Mahasiswa

Menurut ajik, kenapa desa sekarang transparan buka data keuangan? Apakah biar pedagang atau warga makin percaya, atau cuma sekadar ikut aturan pemerintah saja?

Narasumber

Menurut pandangan saya tentang transparansi keuangan dan data dari desa untuk para UMKM itu cukup bagus. Karena beberapa kali saya sering mendapat sub-project yang masuk di desa, dan saya rasa tidak pernah ada masalah. Jadi, transparansi secara keuangan atau pembukuannya itu relatif sangat transparan.

Mahasiswa

Kenten ajik, kalau ada sesama pedagang yang protes agak keras ke desa (misal soal retribusi atau lapak), bagaimana reaksi perangkat desa? Diterima sebagai masukan atau malah dianggap pengacau?

Narasumber

Secara umum saya rasa tidak pernah ada masalah. Kedekatan antara aparat desa dengan para UMKM ataupun pemilik lapak tentunya selalu baik secara hubungan, karena beberapa kali kami juga diundang untuk memberikan input ataupun pemaparan dari pihak UMKM itu sendiri ke pihak desa.

Mahasiswa

Kalau mau cari info soal bantuan modal atau pelatihan UMKM, paling gampang lihat di mana? Papan pengumuman kantor desa, Facebook, atau grup WA warga?

Narasumber

Untuk ketersediaan informasi dari desa mungkin sudah bagus, karena dengan media digital saat ini orang cukup mudah melihat dari beberapa halaman (page) atau platform. Tapi saya rasa mungkin perlu ditingkatkan lagi, karena tidak semua UMKM memiliki akun media sosial. Saat ini mungkin anak muda yang lebih banyak berperan di sana, padahal pelaku UMKM tidak hanya anak muda. Ada juga orang tua yang istilahnya agak gaptek (gagap teknologi) dan kadang tidak bisa mengikuti hal tersebut. Masukan dari saya sebagai pelaku UMKM di Desa Baktiseraga, mungkin sesekali perlu dilakukan pendekatan door-to-door atau pemasangan banner agar informasinya bisa menjangkau ke semua kalangan.

Mahasiswa

Misalnya ada proyek pembangunan pasar atau jalan desa, ajik bisa tahu tidak detail biayanya? Atau tahunya cuma terima jadi saja tanpa tahu rincian harganya?

Narasumber

Transparansi informasi juga cukup bagus. Pengalaman saya terkait keuangan di Desa Baktiseraga saat mendapatkan proyek desa waktu itu, detail dan formatnya sangat jelas; ke mana uangnya, untuk apa, dan seperti apa. Itu sudah sangat bagus menurut saya.

Namun, apakah hal tersebut bisa dilihat atau diakses oleh seluruh masyarakat Desa Baktiseraga secara menyeluruh, saya tidak bisa menjamin. Kalau kita bertanya atau ada keperluan, mungkin pihak Desa Baktiseraga akan memaparkan secara detail. Cuma, kalau kita tidak ada keperluan, mungkin kita tidak akan mendapatkan informasi itu karena laporannya tidak di-sounding atau dipampang di jalanan. Jadi, informasi tersebut lebih disesuaikan dengan tupoksi atau keperluan kita, dan pastinya pihak desa akan bisa memaparkannya dengan baik.

Mahasiswa

Sepengamatan ajik, hubungan antara BPD (wakil warga) dan Perbekel itu kompak tidak dalam memajukan ekonomi desa? Atau sering beda pendapat yang bikin bingung warga?

Narasumber

Hubungan BPD dengan Perbekel itu cukup kompak. Saya pernah menghadiri beberapa pertemuan, dan pihak BPD itu selalu diharuskan hadir karena merekalah yang bisa melihat seperti apa program-program desa berjalan serta bagaimana pelaksanaannya oleh aparat desa dan masyarakat. Jadi untuk masalah hubungan, saya rasa sangat baik. Tidak pernah ada permasalahan yang mencuat, sehingga tidak membuat masyarakat bingung mengenai apa sebenarnya fungsi BPD dan hubungannya dengan Perbekel.

Mahasiswa

Pernah tidak ajik mengusulkan sesuatu ke desa (misal tenda atau lampu jalan) tapi ditolak? Kalau ditolak, desa kasih alasan yang masuk akal tidak kenapa belum bisa dibantu?

Narasumber

Sepengetahuan saya, tidak pernah ada usul atau pendapat yang ditolak. Pada dasarnya, semua orang bisa memberikan input, tapi input tersebut harus dibarengi dengan usulan program yang baik.

Mahasiswa

Kalau ada bangunan desa yang sudah jadi (misal kios desa), pedagang diajak mengecek kualitasnya tidak sebelum diserahterimakan? Atau terima kunci saja?

Narasumber

Saya rasa kalau tujuannya memang untuk membangun, serta secara teknis dan programnya bagus, pasti akan diterima oleh desa. Tapi karena ini biasanya menyangkut dana, kalau istilahnya ada slot dana yang masuk atau tersedia, pasti bisa dilakukan. Kalau tidak ada, biasanya akan sulit. Bagaimanapun, pembangunan itu punya orientasi dan skala prioritas, mana yang paling dipentingkan itu yang akan didahulukan.

Mahasiswa

Sering tidak obrolan santai pedagang di warung kopi atau pasar didengar sama perangkat desa dan dijadikan kebijakan beneran?

Narasumber

Hal ini sering terjadi. Diskusi dan pembelajaran lintas pemangku kepentingan tidak hanya terjadi di warung kopi, tapi kami juga sering ngopi bareng di kantor desa atau di Pantai Penimbangan. Pantai Penimbangan sendiri adalah objek yang secara kewilayahan masuk dalam area Desa Baktiseraga, dan banyak program desa yang difokuskan di sana, baik secara khusus maupun umum. Fokus utamanya lebih ke ranah publik, seperti pengelolaan sampah dan menjaga kelestarian alam. Itu menurut pendapat atau pandangan saya.

Mahasiswa

Kalau desa rapat membahas anggaran (Musrenbang), apakah UMKM seperti ajik sering diundang? Atau yang datang cuma tokoh-tokoh besar itu-itu saja?

Narasumber

Ya, ini yang seperti pengetahuan saya, ya sering juga diundang beberapa waktu. Cuman karena saya adalah tupoksinya adalah UMKM di bagian jasa, spesifiknya adalah seorang filmmaker ataupun photographer, tidak terlalu dipentingkan karena ini lebih ke dasarnya adalah ke fisik. Jadi, kayak model-model pedagang-pedagang, ya istilahnya fisiklah, bergerak di fisik.

Mahasiswa

Jujur saja Ajik, kalau ada warga yang berani lapor soal ketidakberesan uang desa, nasib usahanya gimana? Apakah dipersulit izinnya atau malah didukung warga lain?

Narasumber

Saya rasa ini semua pasti ada solusinya. Jadi, masalah ketidakberesan uang desa, nasib usaha, apakah dipersulit izin atau tidak, ini lebih ke komunikasi lah ya. Dan saya rasa, yang sepengetahuan saya dan pandangan saya sendiri secara jujur bahwa selalu ada solusi dari desa. Bagaimanapun permasalahan tentang bisnis ataupun tentang usaha UMKM, itu selalu ada pemaparan lah dari desa dan tidak mungkin akan dipersulit, itu menurut pandangan saya. Karena kecuali UMKM itu sendiri bergerak sendiri tanpa alur yang diminta ataupun di-rule oleh desa (jadi dia tanda kutip adalah membangkang), itu akan berbeda urusan lah. Ini lebih ke kewajaran kita kalau berusaha di wilayah Baktiseraga. Berusaha rasanya kalau kita melakukan ataupun sesuai dengan aturan, rasanya tidak akan pernah terjadi permasalahan.

Mahasiswa

Kalau uang desa lagi terbatas, menurut ajik, desa lebih mementingkan yang mana: bangun gapura/tembok kantor, atau program bantuan alat buat UMKM?

Narasumber

Nah ini agak terbatas pengetahuan saya tentang ini. Tentang program-program yang mana mungkin yang akan dipentingkan atau tidak. Rasanya segala hal program yang ada di desa untuk masyarakatnya itu cukup transparan dan menjadi mana yang prioritas. Seperti bahasa tadi, mana yang prioritas itu yang akan diutamakan. Bukan berarti yang tidak prioritas tidak dilakukan, tapi mungkin ada step by step-nya lah untuk bisa diselesaikan.

Mahasiswa

Apa janji Kepala Desa soal 'Desa Digital' yang paling ajik ingat? Apakah janji itu sudah terasa manfaatnya buat jualan online, atau masih wacana saja?

Narasumber

Nah menurut saya di zaman sekarang, di zaman digital, itu mesti memang banyak hal bahkan berapa persen harus dilakukan di dunia digital untuk memperlancar ataupun meningkatkan lah daya jual ataupun daya beli masyarakat. Kebanyakan memakai sistem digital. Dan saya rasa ini yang perlu diangkat, perlu di-push lagi dari desa-desa lagi. Mungkin sudah berjalan cuman belum begitu maksimal. Karena mungkin saya kurang tau, karena mestinya ada divisi-divisi yang lebih memiliki peran di dunia digital. Karena mau tidak mau, perkembangan ke depan semua hal itu bergulat ataupun banyak dilakukan di dunia digital. Bukan berarti konvensional tidak ada, cuman akan lebih baik dilakukan secara digital. Dan pandangan saya, Desa Baktiseraga sendiri perlu memiliki tim yang memang operasionalnya adalah di dunia digital dan bahkan lebih diaktifkan

lagi. Yang saya lihat sih belum terlalu ya, jadi lebih ke konvensional, lebih ke door-to-door ataupun orang-orang. Ya saya rasa ini yang perlu ditingkatkan lagi.

Mahasiswa

Apakah hukum adat atau awig-awig di sini cukup kuat untuk mencegah korupsi? Maksudnya, apakah aparat desa takut sanksi adat kalau main-main sama uang desa?

Narasumber

Oke, awig-awig gini ya, saya kurang begitu paham. Untuk mencegah korupsi ataupun secara hukum awig-awig adat, ataupun desa adat, ataupun desa dinas, itu saya kurang begitu paham. Tapi yang pasti pengaturan secara keuangan dengan transparansinya, khusus untuk desa dinas itu sudah cukup bagus dan saya rasa tidak akan ada masalah. Cuma masalah sanksi, sanksi adat, ini saya kurang begitu paham tentang masalah uang desa.

Mahasiswa

Apakah ajik merasa aturan desa soal usaha misal izin keramaian/usaha sudah sejalan dengan aturan Kabupaten? Atau malah tumpang tindih bikin bingung?

Narasumber

Sepengetahuan saya sudah. Jadi tentang masalah aturan ataupun semisal izin usaha, itu biasanya sudah korelasinya ada di satu lain lah dengan kabupaten. Dan saya pernah juga secara (ini contoh saja) membuat sebuah izin usaha yang saya harus tindak lanjuti untuk ke kabupaten, dan awalnya adalah perizinan di desa. Jadi pihak kabupaten ataupun pihak yang akan mengeluarkan izin itu tahu apa menjadi usahanya, terus asal usahanya di mana. Itu sudah baik lah, sudah bagus lah yang dilakukan dari desa untuk masalah perizinan. Dan sejalan dengan program dari kabupaten.

Mahasiswa

Siapa sih tokoh di desa ini yang paling rajin memperjuangkan nasib pedagang/UMKM? Desa mendengarkan dia tidak?

Narasumber

Yang saya lihat dan saya sering diskusi dengan kepala desa, itu banyak program-program yang sudah dilakukan, dan itu adalah program juga dari pusat. Contoh saja tentang ketahanan pangan yang saya tahu. Cuma kalau kita mengatakan bahwa itu adalah usaha yang bisa dilakukan oleh masyarakat, itu rasanya sulit karena apa? Desa Baktiseraga sendiri yang notabene desa rasa kota ya, keperluan lahan untuk ketahanan pangan itu sangat sempit dan rasanya sulit. Kecuali memang orang itu sendiri memiliki lahan yang luas, mungkin bisa dilakukan secara baik tentang program ketahanan pangan. Kalau contoh-contoh lain mungkin banyak ya yang sudah dilakukan oleh tokoh-tokoh desa terutama ya. Kepala desa tentang sampah, bagaimana mengorganize sampah untuk bisa menjadi sebuah income. Dan saya baru kemarin juga podcast dengan Kepala Desa Baktiseraga. Itu hampir 21 karyawan bahasanya yang bisa digaji dari penghasil sampah. Artinya tidak mengambil dari desa untuk menggaji mereka. Itu sesuatu yang sangat luar biasa menurut saya. Ada nilai ekonomi yang bisa dihasilkan dari program desa itu sendiri. Saya rasa kalau masalah tokoh, pastilah seorang leader yang menjadi peran.

Mahasiswa

Ada tidak orang desa atau tokoh yang suka bantuin ajik menerjemahkan bahasa proposal pemerintah yang rumit biar pedagang bisa dapat bantuan?

Narasumber

Ini masalahnya, saya sendiri sebagai wirausaha lebih bergerak di bidang jasa, jadi tidak terlalu banyak hal terkait kolaborasi yang bisa saya tanyakan kepada pihak desa. Yang pasti, saya sendiri sudah banyak membuat karya-karya digital untuk keperluan dokumenter. Melalui hal itu, saya sering membantu pihak desa. Kami juga sering berdiskusi dan saling memberikan pendapat tentang apa yang bisa kita lakukan bersama untuk desa di masa depan.

Mahasiswa

Sistem pelayanan desa yang sekarang sudah bagus ini, kira-kira bakal bertahan tidak kalau ganti Kepala Desa nanti? Atau Ajik khawatir ganti pemimpin ganti aturan lagi?

Narasumber

Oke, untuk pelayanan desa yang saya tahu dan saya juga pernah berkunjung ke desa-desa lain tanpa bermaksud membandingkan Desa Baktiseraga memiliki transparansi data dan pelayanan yang sudah bagus. Bukan relatif lagi, tapi memang sudah bagus karena ini kembali lagi pada faktor kepemimpinan. Secara ketokohan, ketegasan, dan berbagai hal tentang desa serta pelayanannya, sudah sangat-sangat baik.

Saya rasa, kekhawatiran akan adanya pergantian pemimpin dan pergantian aturan pasti sudah dipikirkan oleh Kepala Desa saat ini. Beberapa program sudah berjalan dengan bagus, dan mudah-mudahan ke depannya bisa lebih bagus lagi dengan kehadiran pemimpin berikutnya. Pada dasarnya, pemimpin yang akan turun nanti tidak boleh lepas tangan begitu saja. Paling tidak, mereka bisa memberikan pendampingan atau masukan mengenai apa yang harus dilakukan oleh kepemimpinan berikutnya agar visinya tetap sejalan. Saya rasa kekhawatiran itu ada jika memang visi dan pandangannya sudah berbeda, itu akan agak sulit. Tapi menurut saya, kemungkinan buruk itu kecil. Saya berharap, mudah-mudahan kepemimpinan ke depan memiliki satu pemikiran, satu pendapat, serta satu visi dan misi untuk Desa Baktiseraga yang lebih maju.

Mahasiswa

Kalau Ajik punya ide kreatif (misal bikin festival kuliner desa), kira-kira desa mau fasilitasi izinnya dengan cepat tidak? Atau birokrasinya ribet?"

Narasumber

Nah, ini salah satu contoh yang sempat saya juga baru sekali bahas dengan Kepala Desa Baktiseraga tentang festival dan saya sendiri adalah seorang videographer atau filmmaker. Secara konsep itu mengkolaborasikan tentang film dan musik, dan saya mengajak juga pihak desa, mungkin memiliki program-program lain tentang PKK ataupun dengan UMKM, berkolaborasi kita membuat sebuah event mungkin satu hari ataupun dua hari. Paling tidak bisa mengangkat apa yang kita punya, ataupun seni yang kita punya, atau komoditi yang kita punya bisa kita munculkan ataupun kita bisa publish. Kita bisa tunjukkan di festival tersebut. Dan ini mungkin bisa terealisasi, ini masih tahap pematangan konsep. Saya rasa itu bisa kita lakukan berkolaborasi dengan desa, dan saya rasa pasti difasilitasi dengan izinnya dan tidak akan terlalu ribet.

Mahasiswa

Kalau ajik chat ke WA pengaduan desa soal masalah sampah/keamanan pasar, yang balas itu mesin atau orang? Responsnya cepat atau lambat?

Narasumber

Tentang respons ataupun segala permasalahan ke desa, itu kurang saya begitu mengerti karena saya sendiri tidak memiliki permasalahan yang sama dengan pertanyaan ini. Jadi saya tidak bisa jawab. Saya rasa sih, menurut pandangan saya pasti direspons. Tentang

cepat atau lambat itu mungkin situasional sifatnya. Jadi saya tidak bisa secara matang ataupun detail untuk bisa menjelaskannya.

Mahasiswa

Pernah dengar tidak ada perangkat desa yang ditegur atau disanksi karena mempersulit urusan surat-menyurat warga/pedagang?

Narasumber

Kalau untuk teguran itu sih, sepengetahuan saya sih tidak pernah saya dengar tentang sanksi atau apa, ataupun hal yang berdampak kepada dipersulitnya perizinan atau perdagangan. Itu tidak pernah sih saya dengar, sepengetahuan saya ya. Dan itu rasanya sih tidak terjadi lah, harusnya. Karena Desa Baktiseraga sendiri pasti menindaklanjuti lah kalau memang ada input ataupun pendapat dari masyarakat. Saya rasa sih tidak ada masalah untuk masalah wewenang.

Mahasiswa

Biasanya kalau pedagang diundang rapat desa, mereka datang karena peduli nasib desa atau berharap ada 'uang duduk'-nya sebagai ganti tutup toko?

Narasumber

Ya ini juga bagus. Karena kalau biasanya ada undangan secara resmi dari desa untuk rapat, itu sangat antusias lah dari masyarakat. Ini kalau pertanyaannya adalah 'ada uang duduk ataupun uang apa namanya' di situ sih bukan, karena memang ini lebih ke wawasan. Masyarakat ataupun pedagang itu sendiri bisa memberikan pendapat ke desa, jadi lebih ke sana. Lebih ke bagaimana bisa membangun desanya.

Mungkin ada beberapa orang memiliki pandangan yang seperti itu (harus ada ongkos lah, harus ada apalah namanya), itu mungkin ada. Tapi sebagian besar masyarakat mengatakan bahwa bagaimana desa bisa memberikan pandangan ataupun mengatur mereka dalam berjualan, itu yang lebih penting. Untuk lebih rapi dan bisa membantu memajukan usahanya itu lebih penting, ketimbang kita ngomongin satu pertemuan terus mendapatkan sesuatu. Ada mungkin, tapi tidak banyak, beberapa persen lah, karena itu sebuah karakter dalam masyarakat dan tidak bisa kita... ya seperti itu.

Mahasiswa

Kalau desa sudah transparan dan jujur, ajik rela tidak menyisihkan sedikit keuntungan atau tenaga buat gotong royong bantu desa tanpa dibayar?"

Narasumber

Kalau versi saya, kalau desa transparan dan jujur, saya harus rela menyisihkan sedikit keuntungan tenaga buat gotong royong bantu desa. Itu sesuatu yang sangat harus menurut pandangan saya. Karena apa? Kita hidup di wilayah Baktiseraga, dan paling tidak kita juga memiliki empati untuk pembangunan Desa Baktiseraga agar lebih maju. Bukan hanya masalah keuangan, lebih ke gotong royong. Jadi itu menjadi sebuah kewajiban kita juga sebagai masyarakat. Kalaupun ada orang yang tidak mau, itu mungkin beberapa persen lah.

Pendapat saya juga, desa sebaiknya mengoptimalkan media sosial untuk bisa men-sounding ke masyarakat tentang pentingnya kebersamaan, salah satunya menjaga kebersihan, sampah, dan banyak hal. Bisa mengajak lebih optimal di media sosial karena kita ngomongin Gen Z sekarang lebih banyak bermain di sana. Kalau kita ngomongin door-to-door pastinya memakan waktu.

Mahasiswa

Menurut ajik, desa ini pelit tidak keluar uang buat promosi potensi desa (seperti website wisata/kuliner)? Atau anggarannya cuma habis buat rapat?

Narasumber

Nah ini juga ada korelasinya dengan saya, karena saya orang yang membuat promosi lah. Jadi kalau ngomongin pelit atau tidak, enggak lah ya. Karena beberapa proyek juga sudah pernah saya kolaborasikan dengan desa dan itu tidak pernah ada masalah. Di zaman sekarang dokumentasi adalah sesuatu yang penting, karena itu adalah sebuah laporan visual kepada masyarakat ataupun kepada pemerintah yang lebih atas dari desa. Dengan beralihnya teknologi, laporan itu tidak hanya tersurat. Visual sangat penting sebagai bentuk tanggung jawab agar lebih mengena, lebih detail, dan lebih riil. Menurut saya instrumen itu cukup bagus, tidak pernah ada masalah, dan mungkin bisa dikembangkan lagi di kemudian hari.

Mahasiswa

Kita simulasi ya ajik. Misal akses jalan ke tempat usaha Bli rusak hari Senin, terus lapor ke Desa. Kira-kira hari apa sudah ada perbaikan? Seminggu? Sebulan?

Narasumber

Kalau menurut saya, informasi yang masuk ke pengaduan biasanya di prioritaskan yang masuk dalam kategori urgensi mendesak, yang mana bisa di tahan dulu untuk diselesaikan dengan waktu yang berbeda, saya kira pasti dilakukan secepatnya tapi, tergantung dari masalah yang dikerjakan. Tapi secara pelayanan sudah cukup baik diantara pelayanan yang diberikan.

Mahasiswa

Setahu ajik, apakah desa rajin menempel laporan pertanggungjawaban (LPJ) tepat waktu di akhir tahun? Atau sering telat?"

Narasumber

Nah ini kurang saya tahu ya. Mungkin menempel itu lebih ke di kantor desanya, bukan di jalan rasanya ya. Saya kurang paham tentang masalah penempelan laporan ini.

Mahasiswa

Belajar dari pengalaman pandemi kemarin, bantuan darurat dari desa itu turunnya cepat dan tepat sasaran ke pedagang yang terdampak? Atau prosesnya berbelit-belit?

Narasumber

Oh kalau masalah ini sih yang saya tahu sudah terprogram dengan baik. Apalagi program lansia itu juga sudah berjalan dengan baik. Masalah bantuan rasanya tidak terlalu kita risaukan lah. Begitu tatanan ataupun struktur desa berjalan dengan baik, rasanya mereka bisa cover itu juga dengan baik.

Lampiran 9 Hasil Wawancara Narasumber 4

Mahasiswa

Siap, selamat sore Pak Mangku. Maaf minta izin, Pak Mangku, menyampaikan terkait dengan... Pak Mangku, saya minta izin mendata terkait dengan pengelolaan *best practice* di Pemerintah Desa Baktiseraga. Pak Mangku juga sudah membacanya, ada sekitar 27 pertanyaan. Mohon Pak Mangku selaku Ketua Pokmaswas di Penimbangan Lestari dan juga selaku warga di Baktiseraga, mohon dijawab pertanyaannya sesuai dengan apa yang Pak Mangku ketahui. Tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurangkan, apa yang Pak Mangku rasakan, itu yang Pak Mangku sampaikan.

Pertama, Pak Mangku, saya tanya terkait ini. Pertanyaannya akan saya coba sampaikan lebih simpel agar lebih mudah dijawab. Bagaimana contohnya kita di desa itu kan ada APBDes dan lain-lain. Apakah di saat penyusunan APBDes itu Bapak diundang? Atau kita boleh minta datanya? Bagaimana pelayanan para perangkat desa itu kepada Pak Mangku? Bisa Pak Mangku ceritakan sedikit terkait dengan penyusunan APBDes, Musrenbang, dan lain-lain?

Narasumber

Ya, jadi kami selaku warga masyarakat dan selaku Ketua Pokmaswas, kami selalu diundang oleh Kepala Desa. Dalam hal Musrenbang, masalah keuangan, itu kami selalu diundang dalam acara-acara rapat. Dan untuk minta APBDes, kami kan sudah secara langsung melihat di layar di dalam rapat, itu sudah tercantum semua. Kami sudah merasa lengkap lah.

Mahasiswa

Dalam hal APBDes dan Musrenbang sudah lengkap ya. Berarti tidak ada rasa sungkan ya Pak kalau mau minta data?

Narasumber

Aparat desa sudah terbuka sekali sama saya. Pertanggungjawaban tidak ada yang disembunyikan.

Mahasiswa

Oke, jadi sudah didapat informasinya secara jelas ya. Nah, apakah motivasi terbesar Pemerintahan Desa Baktiseraga dalam membuka data keuangan? Apakah ada dorongan lokal untuk transparansi? Kalau dari Pak Mangku sendiri, apakah karena tadi sudah disampaikan sudah transparan, apakah itu cukup bagi Bapak selaku masyarakat, atau ada hal yang perlu lagi disebarluaskan terkait data keuangan? Atau cukup dengan yang selama ini sudah terjadi di desa?

Narasumber

Kalau seperti itu kan harus disebarluaskan melalui fotokopi ya, di RT-RT dan BPD terutama.

Mahasiswa

Selama ini kan kalau yang saya lihat cuma ditempel di spanduk gitu aja, kurang ya?

Narasumber

Kurang lah. Kalau lewat di sana dan terbaca, tapi kan sekedar lewat, itu enggak cukup. Masukan saya, ke RT dan BPD diinformasikan lebih jelas, dikasih lampiran fotokopi.

Mahasiswa

Jadi ada tambahan masukan ya, biar informasinya lebih jelas. Pertanyaan ketiga, bagaimana respons aparat desa ketika ada warga yang bertanya kritis atau sedikit keras soal anggaran dalam rapat? Apakah dianggap sebagai masukan yang membangun atau

dianggap gangguan? Selama ini Bapak ke rapat, ada tidak masyarakat yang komplain? Bagaimana perangkat desa menanggapinya?

Narasumber

Kalau menurut saya, itu diterima sebagai masukan oleh Kepala Desa dan semua perangkat desanya.

Mahasiswa

Kalau dari segi *feedback* perangkat desa bagaimana, Pak? Bagus ya? Jadi tidak dianggap sebagai gangguan, ya?

Narasumber

Kalau yang saya amati, bagus. Selama ada Musdes, Musrenbang, semua masukan itu diterima.

Mahasiswa

Enggak pernah ditolak ya, tidak dianggap gangguan?

Narasumber

Tidak.

Mahasiswa

Kemudian pertanyaan keempat. Lewat saluran apa saja informasi dari APBDes dipublikasikan? Apakah dari papan, *website*, atau medsos? Mana yang menurut Bapak paling sering dilihat warga dan paling efektif? Kalau menurut Pak Mangku, media apa yang paling gampang diakses hari ini kalau warga ingin tahu?

Narasumber

Di zaman sekarang yang sudah canggih, orang kalau mau tahu ya tinggal diklik saja. Lewat *website* bisa.

Mahasiswa

Website ya, karena paling mudah diakses dibandingkan WA.

Narasumber

Iya, di *website* kan lebih detail dan lebih rapi.

Mahasiswa

Oke, kelima. Jika saya adalah warga awam yang ingin tahu harga semen atau aspal dalam proyek jalan desa, apakah informasi sedetail itu bisa saya temukan di publikasi desa, atau cuma terlihat pada anggaran globalnya saja? Seandainya di tempat Bapak ada betonisasi, kalau nanya harga semen dikasih tahu enggak?

Narasumber

Itu kan sudah dikasih tahu sama pemborongnya.

Mahasiswa

Tapi tidak tertulis detail ya? Tapi kalau kita nanya diinfokan ya. Pertanyaan keenam, kebetulan Bapak ini kan BPD ya. Bagaimana dinamika komunikasi antara BPD dan perangkat desa di saat membahas anggaran? Apakah BPD selalu mendapatkan data lengkap dari desa atau ada miskomunikasi?

Narasumber

Saya kira tidak ada miskomunikasi. Kita sebagai mitra kerja kan harus sinergi, kami selalu diberikan fotokopi anggaran.

Mahasiswa

Selalu diberikan ya saat rapat. Jadi jarang ada *miss*. Pertanyaan ketujuh, apabila ada usulan warga dalam Musdes yang ditolak atau belum direalisasikan, bagaimana cara desa memberitahu warga? Apakah dijelaskan atau warga harus bertanya dulu?

Narasumber

Biasanya kan diberikan peluang untuk pertanyaan. Misalnya, usulan dari Dusun Galiran, itu selalu diakomodir tapi kan ada skala prioritas. Jadi ya sabar menunggu. Disampaikan juga mohon menunggu karena harus ada tahapan-tahapannya.

Mahasiswa

Jadi dijelaskan secara lisan di saat rapat ya. Kedelapan, bagaimana mekanisme pelibatan publik dalam evaluasi akhir tahun? Apakah warga dilibatkan menerima laporannya?

Narasumber

Tokoh-tokoh masyarakat selalu dilibatkan dalam hal keuangan. Apapun itu saya kira dilibatkan. Kadang kalau ke lapangan juga kita diajak. Ada penyampaian lewat grup WA juga.

Mahasiswa

Pertanyaan kesembilan. Selain rapat resmi seperti Musrenbang atau Musdes, apakah warga atau aparat desa sering berdiskusi santai soal masalah desa? Pernah enggak diajak diskusi di warung kopi atau acara adat?

Narasumber

Sering. Kadang-kadang di *bale secepat* atau di halaman kantor luar acara resmi, untuk masukan-masukan. Di semua ruang, sesaat ada yang bisa didiskusikan, kalau Bapak bertanya pasti dijawab oleh perangkat.

Mahasiswa

Kesepuluh. Bisa Bapak gambarkan suasana Musrenbang? Apakah peserta yang hadir didominasi oleh tokoh-tokoh yang itu-itu saja, atau masyarakat luas bisa datang?

Narasumber

Selama ini kan yang diundang tokoh masyarakat, RT, BPD, dan Kelian Adat. Memang itu-itu saja, tapi kan itu sudah mewakili masyarakat. Saya kira sudah terwakili.

Mahasiswa

Nah, apakah Bapak pernah mendengar ada anggaran yang dihemat atau dipotong untuk dialokasikan ke program lain yang lebih prioritas? Dan apakah masyarakat diberitahu oleh desa?

Narasumber

Pernah. Dan itu disampaikan. Kadang masyarakat juga tahu dari media sosial. Kalau kita kumpul-kumpul di desa, selalu disampaikan hal seperti itu, dan kita maklum.

Mahasiswa

Oke, pertanyaan kedua belas. Kalau ada warga mau melaporkan masalah di lingkungan, biasanya lapor ke siapa dulu? Responnya cepat tidak?

Narasumber

Kalau yang sering kami lakukan, melibatkan Babin, RT, dan Kadus. Kita diajak ke kantor desa. Langsung direspon. Kalau bisa diselesaikan oleh Pak Babin, beliau yang selesaikan. Kalau tidak bisa, baru ke Kadus, lalu ke Kepala Desa. Prosesnya cepat. Kemarin ada pengalaman orang ngontrak BTN dipakai bengkel dan bising, dilaporkan ke Babin, Pecalang, dan RT, langsung didatangi dan selesai. Sudah ada jenjangnya.

Mahasiswa

Tidak sampai sehari-hari ya. Nah, setuju Bapak, apakah desa patuh terhadap hukum? Pernah melihat ada penyelewengan atau kejanggalan kecil yang dibiarkan saja?

Narasumber

Enggak ada. Di zaman media sosial ini, kita BPD dan perangkat desa selalu berkomunikasi untuk berhati-hati agar tidak melanggar hukum sedikit pun. Karena

sekarang bisa langsung di-*posting*. Saya juga selalu mewanti-wanti perangkat desa. Sepengalaman saya tidak ada.

Mahasiswa

Saat pandemi kemarin kan ada perubahan anggaran darurat. Apakah BPD diajak komunikasi oleh Kepala Desa, atau Kepala Desa mengambil keputusan sendiri?

Narasumber

Saya diajak komunikasi sejak awal sebelum pandemi jauh. Beliau bilang, "Mohon hati-hati mengelola anggaran, ini pandemi bahaya." Saya juga langsung kasih tahu Pak Mekel bahwa pandemi ini bisa bertahun-tahun. Kami selalu mengkomunikasikannya.

Mahasiswa

Jika ada warga yang sangat kritis melapor ketidakberesan proyek desa, contoh pembetonan yang ukurannya dirasa kurang pas, apakah warga itu didukung atau dianggap pengacau? Kepala desa menanggapi bagaimana?

Narasumber

Pak Kepala Desa selalu memberikan pemahaman. Disamping pakai dana desa, kita kan harus bergotong royong juga, jangan mengandalkan anggaran itu saja. Diterima dengan baik oleh Kepala Desa masukan tersebut.

Mahasiswa

Berarti perangkat desa memberikan informasi, kalau anggaran tidak cukup, masyarakat diminta swadaya. Kasus lain, jika ada banyak usulan warga, lalu tiba-tiba ada program titipan dari kabupaten yang harus diprioritaskan, apakah desa menyampaikannya secara terbuka ke warga?

Narasumber

Pernah disampaikan, terbuka, seperti contohnya Koperasi Merah Putih.

Mahasiswa

Bapak tahu tidak apa visi Kepala Desa yang sekarang? Apa yang ingin dibangun untuk desa ini?

Narasumber

Menurut pandangan kami karena sering kumpul, beliau ingin memajukan desa. Membuat fondasi-fondasi desa ke depannya agar tertata bagus. Ambisi Pak Mekel bagus, semua berpola dan terstruktur, seperti pengolahan sampah TPS3R, dan desa wisata.

Mahasiswa

Apakah itu sudah terealisasi atau sekadar wacana?

Narasumber

Sudah terealisasi semua, sampai dapat penghargaan. Pokmaswas tingkat Nasional, TPS3R, banyak prestasinya.

Mahasiswa

Di Bali kan ada konsep *menyama braya* dan *awig-awig* adat. Apakah desa adat atau Sabha Desa diajak ikut mengawasi dana desa terkait penyelewengan?

Narasumber

Selama ini secara langsung belum. Saya rasa melalui perwakilan BPD sudah cukup.

Mahasiswa

Terkait pengelolaan informasi, apakah ada informasi yang ditutupi oleh desa?

Narasumber

Saya kira semua informasi sudah disampaikan dengan keterbukaan lewat BPD.

Mahasiswa

Siapa sosok di desa yang paling sering menanyakan soal anggaran secara kritis? Apakah oknum tersebut diterima dengan baik?

Narasumber

Ada beberapa tokoh masyarakat atau oknum yang di luar sering bertanya, padahal mereka tidak ikut rapat dan tidak baca baliho transparansi yang sudah terpampang. Tapi saat mereka bertanya ke Kepala Desa di ruangan, ya diterima dan selalu diberikan jawaban. Sah-sah saja masyarakat bertanya.

Mahasiswa

Sebagai tokoh masyarakat, apakah Bapak berperan sebagai penerjemah dari pemerintah desa ke warga? Kalau ada warga yang bertanya teknis, apakah Bapak menjelaskannya?

Narasumber

Kalau ada masyarakat bertanya, kami selalu tampung. Saya ajak, "Ayo kita ke kantor desa saja kalau mau lihat daftar transparansinya." Kadang mereka yang tidak mau dan hanya ngomong di luar. Tapi tetap kami sampaikan sesuai dengan kemampuan.

Mahasiswa

Dengan digitalisasi dan fondasi yang dibangun Kepala Desa sekarang, apakah sistem transparansi ini sudah dipatenkan? Jika ganti Kepala Desa, apakah akan berubah lagi?

Narasumber

Kemungkinan ada, tapi saya rasa ini sudah canggih sekali. Apalagi kalau melihat kemampuan individu pemimpin kan beda-beda. Tapi sistem digitalisasinya sudah berjalan, rasanya susah kalau mau dihilangkan ke depannya, mungkin malah ditambah.

Mahasiswa

Jika ada staf muda atau warga yang punya ide baru, misalnya pakai Google Form untuk keluhan warga, apakah ide itu dieksekusi oleh desa atau dibiarkan?

Narasumber

Ditampung dan dieksekusi, tapi kan tergantung kesediaan anggarannya. Tetap diterima oleh Kepala Desa sebagai masukan masyarakat.

Mahasiswa

Selama ini kalau komplain atau bertanya masalah desa, Bapak bertanya ke siapa? Apakah semua perangkat desa tahu secara detail?

Narasumber

Kalau kami ke Kadus dulu, kadang-kadang langsung saat kumpul dengan Kepala Desa. Jadi ke wilayahnya dulu, misalnya ke Kadus Galiran kalau masalahnya di wilayah sana. Kalau tidak bisa dijawab, langsung ke kantor desa.

Mahasiswa

Pernah dengar ada perangkat desa yang bermasalah terkait transparansi data? Misalnya menyembunyikan informasi? Dan bagaimana penegakannya di desa?

Narasumber

Kepala Desa sangat ketat, saya kira tidak ada. Pak Mekel tiap pagi mengumpulkan perangkat desa untuk *briefing*. Kalau ada kekeliruan, beliau langsung memanggil perangkat tersebut dan menegur di ruangnya untuk diperbaiki.

Mahasiswa

Terkait proyek betonisasi, apakah masyarakat miskin juga diwajibkan ikut swadaya?

Narasumber

Di masyarakat banyak karakternya. Ada yang murni mau gotong royong tanpa pamrih, ada yang selalu tanya "dibayar enggak?". Hal itu sudah biasa.

Mahasiswa

Proyek-proyek itu dipantau langsung oleh masyarakat ya?

Narasumber

Iya, dipantau dan diawasi oleh masyarakat di lingkungannya, karena itu menyangkut anggaran. Sah-sah saja mereka memantau dan memberikan masukan.



Mahasiswa

"Yang pertama, Pak. Dari pengalaman Tat kala dalam pengamatan redaksi, apakah Pemdes Baktiseraga benar-benar efektif mengedukasi masyarakat, atau sebenarnya masih pasif? Apakah masyarakat tahu cara mengakses dokumen-dokumen penting di desa, Pak?"

Narasumber

"Sebenarnya, untuk dokumen penting, perangkat desa yang seharusnya lebih aktif. Kita tahu masyarakat kita itu, kalau tidak berkaitan langsung dengan urusan hidupnya, mereka tidak akan menanyakan. Paling yang ditanya soal KTP atau Akta Kelahiran. Dokumen lain seperti anggaran, biasanya tidak ditanyakan.

Narasumber

"Tapi Baktiseraga itu warganya heterogen, banyak yang bukan penduduk asli desa dan aktif mencari informasi. Kalau tidak dapat dari kantor desa, mereka bisa dapat dari media massa atau media sosial. Di sinilah peran Kepala Desa dan perangkatnya untuk memperkenalkan informasi lewat media tersebut. Jadinya, meskipun masyarakat itu pasif tidak bertanya ke kantor desa, mereka akan gampang mengetahuinya. Kepala desanya juga aktif memberikan penjelasan lewat media atau saat ngobrol santai."

Mahasiswa

"Pertanyaan kedua. Menurut analisa teman-teman media, apa sebenarnya *driver* utama Pemdes Baktiseraga membuka data keuangan? Apakah murni dari reformasi tata kelola (*good governance*), dorongan tokoh, atau sekadar mem-branding citra diri di media?"

Narasumber

"Secara standar memang warga berhak tahu. Kalau saya melihatnya, ini bukan pencitraan. Ini murni karakter dari Kepala Desa dan perangkatnya untuk menjalankan kewajiban bahwa warga berhak tahu apa yang akan dibangun, dananya berapa, dan dari mana. Misalnya ada info BKK, dijelaskan peruntukannya. Itu penting untuk mendapatkan *feedback* dari warga, misalnya warga bisa protes kalau ada bangunan yang terlalu mahal. Itu bisa jadi bahan evaluasi.

Narasumber

"Lagi pula, transparansi itu tidak bisa dicitrakan di depan warga Baktiseraga yang heterogen (ada polisi, pegawai negeri, pengusaha). Mereka pasti tahu mana yang murni transparansi dan mana yang sekadar pencitraan. Rugi melakukan pencitraan pada orang-orang kritis seperti itu."

Mahasiswa

"Ini Pak, karena kan dapat beberapa kali menulis liputan tentang Baktiseraga, bahkan juga dengan Pak Kepala Desa beberapa kali. Bagaimana sebenarnya kultur birokrasi di Baktiseraga saat menghadapi kritik keras dari warga dan juga sorotan media terkait dengan anggaran? Apakah mereka terbuka, *open-minded*, atau cenderung reaktif dan juga defensif?"

Narasumber

"Dari pengalaman saya, dan teman-teman juga sering cerita ya, teman-teman wartawan itu... ya memang terbuka gitu, nggak ada yang ditutupi. Karena saya yakin kalau itu ditutupi—atau ketika menghadapi kritik, responnya berbeda—itu akan menimbulkan dampak pemberitaan dan memunculkan citra yang tidak bagus gitu. Ya, saya pikir itu terbuka, sangat terbuka gitu. Apa-apa dikatakan, kan."

Mahasiwwa

"Oke, terbuka ini aja."

Mahasiswa

"Pertanyaan keempat. Sebagai jurnalis yang sering berburu data primer, apakah performa publikasi desa (website, baliho) menyediakan data yang valid dan *up-to-date* untuk keperluan investigasi jurnalistik?"

Narasumber

"Kalau sampai ke investigasi sih tidak, karena investigasi itu beda yang dicari. Publikasi itu kan tidak menyebutkan rincian sampai jadwal makan buruh jam berapa. Investigasi itu dilakukan untuk hal-hal khusus, misalnya kalau setelah dibangun tiba-tiba bangunannya roboh atau bahannya kurang, tidak sesuai dengan yang diumumkan."

Narasumber

"Tapi untuk sekadar kebutuhan tahu dan membangun kepercayaan publik, publikasi yang ada sudah cukup. Nanti data primer atau pengumuman itulah yang dipakai warga sebagai bahan evaluasi setelah dana digunakan."

Penanya: "Pertanyaan kelima. Terkait prinsip *open data*, saat media atau warga ingin menyelidik detail proyek seperti RAB, apakah data *granular* ini mudah didapatkan, atau desa hanya mempublikasikan angka gelondongan?"

Narasumber

"Kerja jurnalistik sebenarnya tidak sampai audit, itu bukan kerjaan wartawan. Tapi untuk keperluan jurnalistik seperti menanyakan detail harga bahan, di mana beli bahannya, apakah toko lokal atau dari luar, itu masih bisa dijawab oleh desa. Selama ini mereka terbuka. Bahkan ditanya lewat WA pun pasti dikasih tahu."

Mahasiswa

"Pertanyaan keenam. Dari kacamata *watchdog*, bagaimana redaksi melihat dinamika antara BPD dan Perbekel (Kepala Desa)? Apakah BPD benar-benar menjadi mitra kritis, atau sudah terjadi perselingkuhan politik di antara mereka?"

Narasumber

"Secara langsung saya tidak pernah melihat hubungan mereka seperti apa. Tapi dari dinamika kasus per kasus, kalau ada sesuatu yang dipertanyakan warga, biasanya BPD ikut meneruskan pertanyaan itu ke desa. Kenyataannya selama ini pembangunan berjalan lancar. Kalaupun ada pertanyaan, artinya sudah dijawab."

Narasumber

"Kalau pembangunan sudah jalan tanpa banyak pertanyaan, artinya Kepala Desa dan BPD sebelumnya pasti sudah bertemu dan sepakat. Hubungan mereka baik-baik saja dalam pengertian yang wajar. Pemerintahnya transparan, sudah mengeluarkan data, jadi BPD juga bingung apa lagi yang mau ditanyakan karena semua sudah sesuai."

Mahasiswa

"Ketujuh. Apakah sistem *feedback* desa berjalan transparan? Jika usulan masyarakat di Musdes ditolak, apakah desa memberikan penjelasan tertulis/data logis yang bisa diverifikasi, atau hanya sekadar janji lisan?"

Narasumber

"Saya yakin pasti terbuka dan logis. Berdasarkan karakter Kepala Desanya, semua hal itu diomongin. Setiap hal yang dilakukan pasti disampaikan secara terstruktur dan mengandung kelogisan atau logika-logika yang jelas. Dari beberapa kali saya melihat cara Kepala Desa menangani masalah, sejauh ini belum pernah dengar ada warga yang protes langsung karena ditolak tanpa alasan."

Mahasiswa

"Kedelapan. Dalam laporan akhir tahun, sejauh mana media melihat adanya pelibatan publik yang substantif dalam audit fisik pembangunan? Apakah *social audit* hidup di desa ini, atau sekadar sudah dibangun ya sudah selesai?"

Narasumber

"Karena desa ini di kota dengan warga yang latar belakang pendidikan dan sosialnya beragam, pasti ada yang mempertanyakan. Tapi sampai sekarang tidak ada pertanyaan yang berlanjut sampai jadi protes besar. Artinya, proses pengawasan itu sudah berjalan dengan baik. Tidak harus lewat pertemuan formal, kadang lewat obrolan di luar kantor pun kalau warga nanya habis dana berapa, pasti dijawab dengan transparan oleh desa."

Mahasiswa

"Kesembilan. Media kan sering ngobrol sama masyarakat. Seberapa besar obrolan di warung kopi atau banjar itu menjadi pendobrak dan masuk menjadi kebijakan formal desa?"

Narasumber

"Apakah itu sampai menjadi kebijakan formal tertulis saya kurang tahu. Tapi contohnya di Pantai Penimbangan, dulu banyak warung yang tidak tertata. Setelah ada obrolan-obrolan mengenai bagaimana menata pantai, saya melihat pemerintah desa langsung mengambil tindakan penataan. Apakah itu masuk ke kebijakan formal saya tidak tahu, tapi setidaknya ada timbal balik. Obrolan yang dirasa penting oleh desa, pasti dieksekusi dulu."

Mahasiswa

"Pertanyaan kesepuluh, Pak ya. Sebagai pihak yang mungkin pernah meliput Musrenbang, apakah forum itu inklusif, Pak? Atau apakah suara-suara marginal atau wajah baru benar-benar diberi panggung, atau forum tersebut sudah diorkestrasi oleh elit-elit desa saja? Misalnya orang luar datang atau ada orang-orang titipan yang ikut Musrenbang, apakah masukan mereka diterima oleh desa, atau cuma diterima sebatas basa-basi, Pak?"

Narasumber

"Saya enggak pernah mengikuti Musrenbang. Tapi kalau ada, saya menduga pasti didengar. Masyarakat Baktiseraga itu kan heterogen, tidak mengelompok. Banyak orang asing atau pendatang, istilahnya '*ada tumen ne teka nah*' (ada pendatang baru yang datang). Pasti ada orang-orang seperti itu di Baktiseraga. Karena kesibukan, mereka mungkin jarang ikut campur, tapi tiba-tiba mereka punya keinginan untuk menyumbangkan pikiran dalam pembangunan dan mereka datang, itu pasti didengar."

Mahasiswa

"Ke-Sebelas, Pak. Ini soal ruang sipil ya (*civic space*). Jika Tatkala mengutip narasumber warga Baktiseraga yang vokal membongkar ketidakbenaran sebuah proyek misalnya, apakah ada jaminan dia tidak dipersekusi atau dianggap pengacau, atau bahkan dikucilkan dari kalangan desa? Sebagai media, bagaimana Bapak melihat *feedback* desa terhadap hal ini?"

Narasumber

"Saya sih enggak pernah melihat ada warga yang sampai membongkar seperti itu, setidaknya pada pemerintahan yang sekarang. Dulu memang sering terjadi konflik-konflik, tapi sekarang kita bisa melihatnya dari media sosial. Ketika ada narasumber yang menyampaikan tentang suatu kegiatan, biasanya ditanggapi dan ada penjelasan. Artinya dijelaskan, bukan dipersekusi. Sampai sekarang saya tidak melihat ada

pelaporan atau protes berlanjut terkait proyek. Kalau di masa lalu, iya, ada. Sebelum kepemimpinan yang sekarang, awal-awal reformasi, ketegangan politik sering membuat prasangka tumbuh subur. Tapi sekarang kalau ada yang tanya, 'Apa ini pembangunan kayak gini?', biasanya langsung dijawab di media, dan perangkat desanya juga menjelaskan."

Mahasiswa

"Ke-Dua Belas, Pak. Bagaimana media memotret independensi dari Pemdes Baktiseraga saat berhadapan dengan program-program titipan politik, baik dari Supra Desa (Kecamatan), Kabupaten, atau dari pihak lain? Apakah usulan prioritas warga sering dikorbankan demi hal ini?"

Narasumber

"Saya pikir Kepala Desa sekarang itu tidak bisa diintervensi. Bahkan oleh keluarganya sendiri, yang dari PDIP juga. Saya sering ngobrol dengannya di luar urusan jurnalistik. Sering juga Kepala Desa tidak mau melakukan hal-hal yang membuat desa condong ke satu partai politik, meskipun ia sangat dekat dengan PDIP. Ia bisa membedakan mana urusan partai dan mana urusan pembangunan desa. Jadi prioritas warga tetap nomor satu."

Mahasiswa

"Ke-tiga belas, Pak. Baktiseraga memiliki narasi atau *legacy* pelayanan digital. Menurut investigasi media, apakah narasi ini sudah mendarat ke langkah konkret di lapangan, atau baru sebatas jargon kosong agar diliput oleh *pers*?"

Narasumber

"Digitalisasi itu dibangun sesuai dengan kebutuhan, saya melihatnya seperti itu. Jadinya hal-hal yang tidak dibutuhkan warga tidak akan dibangun. Misalnya bikin videotron, itu kan belum dibutuhkan warga, jadi tidak dibikin. Tapi untuk pelayanan seperti administrasi kependudukan atau pengurusan sampah secara digital, itu sudah sewajarnya ada karena warga membutuhkannya. Kalau itu kosong atau tidak jalan, warganya yang heterogen pasti sudah protes."

Mahasiswa

"pertanyaan ke empat belas. Dari perspektif jurnalisme budaya, Pak. Bagaimana dialektika antara hukum adat (Awig-awig) dengan hukum positif terkait transparansi dana desa? Apakah institusi adat di sana sukses mengawasi dana desa, atau malah melindungi elit yang korup?"

Narasumber

"Secara umum, Baktiseraga ini cukup unik. Satu Desa Dinas memiliki tiga Desa Adat. Biasanya di Bali Selatan, satu Desa Dinas itu sama dengan satu Desa Adat. Menyelaraskan tiga desa adat ini agak kerja keras bagi Kepala Desa. Kalau cocok dengan satu Desa Dinas, belum tentu cocok dengan Desa Adat lainnya, dan ini berpengaruh pada hubungan mereka.

Narasumber

"Persoalan yang sering muncul biasanya soal pungutan: siapa yang berhak memungut, apakah Desa Dinas atau Desa Adat. Terkait hukum positif dan awig-awig, saya melihat Desa Baktiseraga bisa mengatasinya dan berjalan dengan baik. Tidak sampai menghalangi pembangunan atau ada tindakan kekerasan."

Mahasiswa

"Ke-lima belas. Apakah kepatuhan Kepala Desa terhadap UU Keterbukaan Informasi Publik benar-benar konsisten antara ucapan di depan media dengan implementasi di

lapangan oleh stafnya?"

Narasumber

"Ya, sangat sesuai. Saya tahu stafnya banyak, saya tahu Kepala Desanya, dan saya tahu apa yang diucapkan itu sesuai dengan apa yang diimplementasikan oleh stafnya di lapangan."

Mahasiswa

"Ke-enam belas, Pak. Siapakah sosok atau *agent of change* di akar rumput Desa Baktiseraga yang sering menjadi narasumber tepercaya teman-teman media karena paling cerewet soal anggaran? Apakah ada narasumber-narasumber kritis seperti itu, Pak?"

Narasumber

"Enggak, enggak ada. Kalau dulu ya, kalau media dulu kita tahu siapa yang akan mengkritik kebijakan dan langsung kita hubungi orang itu. Sekarang enggak ada tokoh seperti itu karena semua warga sudah tahu informasinya. Tidak ada narasumber tunggal yang paling tahu."

Narasumber

"Kalau ada dugaan penyimpangan pembangunan, narasumber yang paling kompeten sekarang bukan tokoh kritis yang cuma bisa ngomong, melainkan Ketua BPD atau ketua-ketua organisasi kemasyarakatan di desa itu. Saya tidak suka dengan narasumber yang tiba-tiba merasa jago ngomong tapi tidak punya kapasitas, karena bisa saja dia ngomong karena kebencian politik, bukan karena data."

Mahasiswa

"Ke-tujuh belas, Pak. Apakah ada elemen masyarakat (*civil society*) atau tokoh di desa yang aktif bertindak sebagai penerjemah data teknis APBDes agar menjadi narasi yang mudah dipahami warga?"

Narasumber

"Saya enggak pernah melihat ada orang khusus untuk itu. Memang penting ada penerjemah seperti itu, tapi di zaman sekarang tingkat kebutuhannya tidak terlalu tinggi. Hanya orang yang menarasikan hal tersebut yang biasanya menjawab pertanyaan."

Narasumber

"Kalau ada warga yang bertanya, staf desa semuanya bagus-bagus dalam menjelaskan. Staf bisa menjelaskan dengan baik, bahkan CS (Customer Service/penjaga yang tidak punya jabatan tinggi) pun bisa menjelaskan, karena mereka diajak dari awal perencanaan sampai eksekusi. Tidak ada transfer ilmu secara formal, tapi mereka paham karena mereka ikut terlibat."

Mahasiswa

"Ke-delapan belas, Pak. Media mencatat rekam jejak. Apakah sistem transparansi yang digunakan di Baktiseraga ini sudah dipatenkan atau kuat dalam Perdes, atau ini cuman *one-man show* yang akan runtuh kalau Kepala Desanya diganti, Pak?"

Narasumber

"Saya enggak tahu apakah itu sudah di-Perdes-kan. Sistemnya secara Perdes, yang saya tahu, tidak ada Perdes khusus untuk itu. Yang dibangun oleh beliau adalah pondasinya."

Narasumber

"Apakah pondasi ini akan berubah jika ganti Kepala Desa? Saya pikir akan berubah. Bisa lebih baik, bisa lebih buruk. Karakter pemerintahan desa kan seperti itu. Kalau dipilih kepala desa yang dulunya bankir, cara berpikirnya pasti beda dengan kalau yang terpilih adalah orang yang terbiasa menyembunyikan data. Sistem transparansi ada

aturannya, tapi cara menyampaikannya ke warga, cara sosialisasinya, itu tergantung karakter Kepala Desanya."

Mahasiswa

"Lanjut, Pak, ya. Pertanyaan ke-sembilan belas. Bagaimana kelincahan atau *agility* birokrasi Pemdes jika ada inovasi atau desakan perbaikan sistem pelaporan dari warganya atau stafnya, Pak? Apakah ide-ide yang bersumber dari masyarakat itu diakomodir atau justru dimatikan begitu saja, Pak? Bagaimana Bapak melihat dari sisi pelayanannya?"

Narasumber: "Diakomodir. Masalah itu dilakukan saat itu langsung, besok, atau setidaknya hal tersebut pasti direncanakan. Tidak menolak berarti, ya, tidak menolak."

Mahasiswa

"Ke-dua puluh, Pak. Saat media meminta data resmi, seberapa responsifkah pejabat informasinya atau staf desanya? Apakah tugas pengelolaan informasi publik itu berjalan sesuai dengan yang ada?"

Narasumber

"Berdasarkan pengalaman, saya tidak begitu sering mencari informasi ke kantor Desa Baktiseraga. Tapi untuk menanyakan sesuatu itu tergolong cepat. Kalaupun stafnya tidak tahu, kita diminta menunggu untuk ditanyakan lebih lanjut. Memang ada hal-hal yang staf tidak boleh sembarangan memberi tahu."

Narasumber

"Kalau sekadar persoalan data, staf di bawah boleh memberikannya karena data tidak akan berubah. Yang biasanya tidak bisa dijawab langsung oleh staf adalah pertanyaan tentang kebijakan, itu memang ranahnya Kepala Desa. Jadi ketika tidak dapat jawaban, kita menunggu atau kadang diteleponkan ke atasannya."

Mahasiswa

"Ke-dua puluh satu, Pak. Dalam peliputan media, pernahkah terdengar ada sanksi tegas di internal Pemdes Baktiseraga bagi perangkat desa yang ketahuan menyembunyikan informasi publik?"

Narasumber

"Tidak pernah dengar. Kemungkinan seperti itu terjadi biasanya karena karakter staf yang berbeda-beda. Ada yang takut memberikan informasi karena tidak tahu aturannya, jadi takut salah, bukan karena ada niat sengaja menyembunyikan. Saya sebagai wartawan paham hal seperti itu dan tidak akan mendesak staf yang ketakutan. Biasanya saya mencari atasan yang berani menjawab atau langsung ke Kepala Desanya."

Mahasiswa

"Pertanyaan Ke-Dua Puluh Dua Dari amatan lapangan, apakah mobilisasi warga dalam kegiatan/rapat desa di sana murni karena kesadaran swadaya, atau sudah terkontaminasi oleh politik transaksional?"

Narasumber

"Saya melihat partisipasi dan mobilisasi warga di Baktiseraga itu murni didorong oleh kesadaran swadaya, bukan karena iming-iming 'uang duduk' atau politik transaksional"

Mahasiswa

"Ke-dua puluh tiga. Apakah narasi desa transparan di Baktiseraga berhasil mengkonversi *trust* publik pada kerelaan warga untuk ikut mengawasi proyek secara sukarela tanpa bayaran, Pak?"

Narasumber

"Itu pasti terjadi. Karena transparan, orang secara organik akan ikut mengawasi. Ada

tiga tipe pengawasan: pertama, karena mencari-cari kesalahan (mungkin menganggap musuh); kedua, untuk mengamankan proyek tersebut; dan ketiga, karena sekadar ingin tahu. Misalnya saat ada pembangunan jalan atau BUMDes, pasti ada orang-orang dengan motif berbeda-beda yang datang memantau. Proses semacam ini dalam iklim demokrasi justru bagus."

Penanya

"Ke-dua puluh empat. Melihat pos anggaran desa, Pak, apakah belanja untuk komunikasi publik digunakan secara tepat guna untuk edukasi warga, atau rawan dipolitisasi sekadar untuk membeli publikasi media?"

Narasumber

"Itu tergantung karakternya sejak awal. Kalau desa tersebut pada dasarnya tidak berniat mencari pencitraan, mereka tidak akan membeli publikasi. Biasanya, publikasi baru 'dibeli' oleh pihak yang melakukan kesalahan untuk menutupi hal tersebut. Jika semuanya berjalan baik, media akan memberitakan secara sukarela berdasarkan apa yang memang dibangun atau dilakukan oleh desa."

Mahasiswa

"Ke-dua puluh lima. Jika sebuah isu di Baktiseraga viral di Tatkala atau media sosial lainnya seperti jalan rusak, seberapa cepat instrumen kelembagaan desa merespons aduan tersebut hingga ada kepastian perbaikan?"

Narasumber

"Media Tatkala jarang memberitakan aduan seperti itu. Tapi biasanya keluhan selalu dijawab. Di Tatkala, Kepala Desanya juga memiliki kolom sendiri untuk menulis. Misalnya tentang isu hutan, beliau menuliskannya sendiri sebagai bentuk penjelasan atau respons."

Mahasiswa

"Ke-dua puluh enam. Secara jurnalistik, sejauh mana Pemdes Baktiseraga mematuhi tenggat waktu mempublikasi Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) sesuai amanat regulasi? Apakah publikasi dilakukan tanpa harus ditagih?"

Narasumber

"Publikasi itu bisa lewat media atau baliho. Selama desa tersebut baik-baik saja, tidak akan ada wartawan yang menanyakan publikasi SPJ anggaran, karena pembacanya pun tidak ada. Desa biasanya akan bermasalah kalau sampai wartawan menanyakan SPJ. Untuk publikasi standar (seperti di baliho), itu sudah berjalan dan biasanya dipasang tepat waktu setiap bulannya atau setahun sekali secara rutin."

Mahasiswa

"Terakhir, pertanyaan ke dua puluh tujuh. Berkaca dari masa krisis pandemi kemarin, apakah penggunaan dana desa darurat atau BLT terbukti akuntabel dan partisipatif, atau media menemukan adanya penyalahgunaan wewenang secara sepihak oleh elite perangkat desa?"

Narasumber

"Kalau kita melihat, tidak ada pemberitaan buruk terkait hal itu. Artinya tidak ada penyalahgunaan wewenang dan semua sudah berjalan dengan baik. Kalaupun program itu tidak berjalan, pasti sudah ada pemberitaan buruknya."

Mahasiswa

"Oke, siap Pak. Dua puluh tujuh pertanyaan sudah saya terima jawabannya semua. Terima kasih banyak, Pak."

Lampiran 11 Skoring Hasil Wawancara dengan Narasumber

Dimensi	Kondisi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Kategori	1	2	3	4	5
Pengetahuan	1. Kesadaran	1.1	Bisa Bapak/Ibu ceritakan, bagaimana biasanya warga mendapatkan informasi bahwa penyusunan RKPDes akan dimulai? Apakah warga merasa punya hak untuk meminta dokumen anggaran, atau justru merasa sungkan? Kenapa?	Pengetahuan Masyarakat berjalan sangat optimal, transparan, melibatkan seluruh pihak, dan sudah membudaya.	++	√	√		√	
				Pengetahuan Masyarakat sudah berjalan baik dan terbuka, meskipun masih ada beberapa aspek kecil yang perlu ditingkatkan.	+					√
				Pengetahuan Masyarakat ada dan dilaksanakan, namun masih bersifat formalitas atau belum menjangkau seluruh lapisan warga.	0			√		
				Pengetahuan Masyarakat masih sangat terbatas, sering tertutup, dan warga merasa kesulitan dalam berpartisipasi.	-					
				Pengetahuan Masyarakat yang jelas; informasi tertutup dan partisipasi warga diabaikan sama sekali.	--					
		1.2	Apa motivasi terbesar Pemerintah Desa Baktiseraga saat ini dalam membuka data keuangan? Di luar aturan pemerintah pusat, apakah ada dorongan atau tekanan khusus dari tokoh masyarakat lokal yang membuat transparansi ini menjadi wajib dilakukan?	Rasa Urgensi Setempat berjalan sangat optimal, transparan, melibatkan seluruh pihak, dan sudah membudaya.	++	√	√	√	√	√
				Rasa Urgensi Setempat sudah berjalan baik dan terbuka, meskipun masih ada beberapa aspek kecil yang perlu ditingkatkan.	+					
				Rasa Urgensi Setempat ada dan dilaksanakan, namun masih bersifat formalitas atau belum menjangkau seluruh lapisan warga.	0					
				Rasa Urgensi Setempat masih sangat terbatas, sering tertutup, dan warga merasa kesulitan dalam berpartisipasi.	-					
				Tidak ada mekanisme 1.2 Rasa Urgensi Setempat yang jelas; informasi tertutup dan partisipasi warga diabaikan sama sekali.	--					

	1.3	Bagaimana respons aparat desa ketika ada warga yang bertanya kritis atau sedikit keras soal anggaran dalam rapat? Apakah dianggap sebagai masukan membangun atau dianggap gangguan? Bisa diceritakan contoh kejadiannya?	Internalisasi Perilaku berjalan sangat optimal, transparan, melibatkan seluruh pihak, dan sudah membudaya.	++	√	√	√	√	√
			Internalisasi Perilaku sudah berjalan baik dan terbuka, meskipun masih ada beberapa aspek kecil yang perlu ditingkatkan.	+					
			Internalisasi Perilaku ada dan dilaksanakan, namun masih bersifat formalitas atau belum menjangkau seluruh lapisan warga.	0					
			Internalisasi Perilaku masih sangat terbatas, sering tertutup, dan warga merasa kesulitan dalam berpartisipasi.	-					
			Internalisasi Perilaku yang jelas; informasi tertutup dan partisipasi warga diabaikan sama sekali.	--					
	2.1	Lewat saluran mana saja biasanya dokumen APBDes dipublikasikan? Dari sekian banyak saluran (papan pengumuman, website, medsos), mana yang menurut Bapak/Ibu paling sering dilihat warga dan paling efektif?	Ketersediaan Informasi berjalan sangat optimal, transparan, melibatkan seluruh pihak, dan sudah membudaya.	++	√	√		√	
			Ketersediaan Informasi sudah berjalan baik dan terbuka, meskipun masih ada beberapa aspek kecil yang perlu ditingkatkan.	+			√		√
			Ketersediaan Informasi ada dan dilaksanakan, namun masih bersifat formalitas atau belum menjangkau seluruh lapisan warga.	0					
			Ketersediaan Informasi masih sangat terbatas, sering tertutup, dan warga merasa kesulitan dalam berpartisipasi.	-					
			Ketersediaan Informasi yang jelas; informasi tertutup dan partisipasi warga diabaikan sama sekali.	--					
	2.2	Jika saya adalah warga awam yang ingin tahu harga semen atau aspal dalam proyek jalan	Transparansi Informasi berjalan sangat optimal, transparan, melibatkan seluruh pihak, dan sudah membudaya.	++			√	√	√

		desa, apakah informasi sedetail itu bisa saya temukan di publikasi desa? Atau hanya terlihat total anggaran proyeknya saja?	Transparansi Informasi sudah berjalan baik dan terbuka, meskipun masih ada beberapa aspek kecil yang perlu ditingkatkan.	+	√	√			
			Transparansi Informasi ada dan dilaksanakan, namun masih bersifat formalitas atau belum menjangkau seluruh lapisan warga.	0					
			Transparansi Informasi masih sangat terbatas, sering tertutup, dan warga merasa kesulitan dalam berpartisipasi.	-					
			Tidak ada mekanisme 2.2 Transparansi Informasi yang jelas; informasi tertutup dan partisipasi warga diabaikan sama sekali.	--					
	2.3	Bagaimana dinamika komunikasi antara BPD dan Perangkat Desa saat membahas anggaran? Apakah BPD selalu mendapatkan data yang lengkap dari desa, atau pernahkah terjadi miskomunikasi/data yang tidak sampai?	Kohesi Pengetahuan berjalan sangat optimal, transparan, melibatkan seluruh pihak, dan sudah membudaya.	++		√		√	√
			Kohesi Pengetahuan sudah berjalan baik dan terbuka, meskipun masih ada beberapa aspek kecil yang perlu ditingkatkan.	+	√		√		
			Kohesi Pengetahuan ada dan dilaksanakan, namun masih bersifat formalitas atau belum menjangkau seluruh lapisan warga.	0					
			Kohesi Pengetahuan masih sangat terbatas, sering tertutup, dan warga merasa kesulitan dalam berpartisipasi.	-					
			Tidak ada mekanisme 2.3 Kohesi Pengetahuan yang jelas; informasi tertutup dan partisipasi warga diabaikan sama sekali.	--					
	3. Pembelajaran	3.1	Jika usulan warga dalam Musdes ditolak atau belum bisa direalisasikan, bagaimana cara	Pemantauan Cerdas berjalan sangat optimal, transparan, melibatkan seluruh pihak, dan sudah membudaya.	++	√	√		√

Yang Berkelanjutan		desa memberitahu warga tersebut? Apakah ada penjelasan tertulis, atau warga harus bertanya sendiri?	Pemantauan Cerdas sudah berjalan baik dan terbuka, meskipun masih ada beberapa aspek kecil yang perlu ditingkatkan.	+			√	√	
			Pemantauan Cerdas ada dan dilaksanakan, namun masih bersifat formalitas atau belum menjangkau seluruh lapisan warga.	0					
			Pemantauan Cerdas masih sangat terbatas, sering tertutup, dan warga merasa kesulitan dalam berpartisipasi.	-					
			Tidak ada mekanisme 3.1 Pemantauan Cerdas yang jelas; informasi tertutup dan partisipasi warga diabaikan sama sekali.	--					
	3.2	Bagaimana mekanisme pelibatan publik dalam evaluasi akhir tahun? Apakah warga dilibatkan dalam audit fisik bangunan atau hanya menerima laporan lisan?	Evaluasi berjalan sangat optimal, transparan, melibatkan seluruh pihak, dan sudah membudaya.	++	√	√		√	√
			Evaluasi sudah berjalan baik dan terbuka, meskipun masih ada beberapa aspek kecil yang perlu ditingkatkan.	+			√		
			Evaluasi ada dan dilaksanakan, namun masih bersifat formalitas atau belum menjangkau seluruh lapisan warga.	0					
			Evaluasi masih sangat terbatas, sering tertutup, dan warga merasa kesulitan dalam berpartisipasi.	-					
			Tidak ada mekanisme 3.2 Evaluasi yang jelas; informasi tertutup dan partisipasi warga diabaikan sama sekali.	--					
	3.3	Selain rapat resmi seperti Musrenbang, di mana biasanya warga dan aparat desa berdiskusi santai soal masalah desa? Apakah obrolan di warung kopi, banjar, atau acara	Pembelajaran Lintas Pemangku Kepentingan berjalan sangat optimal, transparan, melibatkan seluruh pihak, dan sudah membudaya.	++	√	√	√	√	√
			Pembelajaran Lintas Pemangku Kepentingan sudah berjalan baik dan terbuka, meskipun masih ada beberapa aspek kecil yang perlu ditingkatkan.	+					

			adat seringkali menjadi masukan bagi kebijakan desa?	Pembelajaran Lintas Pemangku Kepentingan ada dan dilaksanakan, namun masih bersifat formalitas atau belum menjangkau seluruh lapisan warga.	0					
				Pembelajaran Lintas Pemangku Kepentingan masih sangat terbatas, sering tertutup, dan warga merasa kesulitan dalam berpartisipasi.	-					
				Tidak ada mekanisme 3.3 Pembelajaran Lintas Pemangku Kepentingan yang jelas; informasi tertutup dan partisipasi warga diabaikan sama sekali.	--					
Keinginan	4. Proses Keterlibatan Pemangku Kepentingan	4.1	Bisa Bapak/Ibu gambarkan suasana saat Musrenbang terakhir? Apakah peserta yang hadir didominasi oleh tokoh-tokoh itu saja atau ada wajah-wajah baru yang berani angkat bicara? Bagaimana reaksi pimpinan rapat saat ada warga yang memotong pembicaraan?	Inklusivitas Pemangku Kepentingan berjalan sangat optimal, transparan, melibatkan seluruh pihak, dan sudah membudaya.	++	√	√	√	√	√
				Inklusivitas Pemangku Kepentingan sudah berjalan baik dan terbuka, meskipun masih ada beberapa aspek kecil yang perlu ditingkatkan.	+					
				Mekanisme 4.1 Inklusivitas Pemangku Kepentingan ada dan dilaksanakan, namun masih bersifat formalitas atau belum menjangkau seluruh lapisan warga.	0					
				Inklusivitas Pemangku Kepentingan masih sangat terbatas, sering tertutup, dan warga merasa kesulitan dalam berpartisipasi.	-					
				Tidak ada mekanisme 4.1 Inklusivitas Pemangku Kepentingan yang jelas; informasi tertutup dan partisipasi warga diabaikan sama sekali.	--					
		4.2	Jika ada warga yang sangat kritis atau melapor soal ketidakberesan proyek desa, apa yang biasanya terjadi pada warga tersebut di lingkungan banjar? Apakah dia justru	Perlindungan Nilai-Nilai Inti berjalan sangat optimal, transparan, melibatkan seluruh pihak, dan sudah membudaya.	++	√	√	√	√	√
				Perlindungan Nilai-Nilai Inti sudah berjalan baik dan terbuka, meskipun masih ada beberapa aspek kecil yang perlu ditingkatkan.	+					

		didukung, atau malah dianggap sebagai 'pengacau' harmoni desa?	Perlindungan Nilai-Nilai Inti ada dan dilaksanakan, namun masih bersifat formalitas atau belum menjangkau seluruh lapisan warga.	0					
			Perlindungan Nilai-Nilai Inti masih sangat terbatas, sering tertutup, dan warga merasa kesulitan dalam berpartisipasi.	-					
			Tidak ada mekanisme 4.2 Perlindungan Nilai-Nilai Inti yang jelas; informasi tertutup dan partisipasi warga diabaikan sama sekali.	--					
	4.3	Dalam situasi di mana anggaran desa terbatas tapi usulan warga banyak, bagaimana cara Pemdes memutuskan mana yang didahulukan? Pernahkah terjadi usulan prioritas warga kalah dengan program titipan dari atas (Kecamatan/Kabupaten)?	Kemajuan Dan Beragam Pilihan berjalan sangat optimal, transparan, melibatkan seluruh pihak, dan sudah membudaya.	++					√
			Kemajuan Dan Beragam Pilihan sudah berjalan baik dan terbuka, meskipun masih ada beberapa aspek kecil yang perlu ditingkatkan.	+	√	√	√	√	
			Kemajuan Dan Beragam Pilihan ada dan dilaksanakan, namun masih bersifat formalitas atau belum menjangkau seluruh lapisan warga.	0					
			Kemajuan Dan Beragam Pilihan masih sangat terbatas, sering tertutup, dan warga merasa kesulitan dalam berpartisipasi.	-					
			Tidak ada mekanisme 4.3 Kemajuan Dan Beragam Pilihan yang jelas; informasi tertutup dan partisipasi warga diabaikan sama sekali.	--					
	5. Ambisi Pengelolaan	5.1	Apa mimpi terbesar atau legacy (warisan) yang ingin ditinggalkan oleh kepemimpinan desa saat ini terkait pelayanan digital? Apakah target tersebut sudah diterjemahkan ke dalam langkah-langkah konkret tahun ini?	Pengelolaan Yang Ambisius Dan Realistis berjalan sangat optimal, transparan, melibatkan seluruh pihak, dan sudah membudaya.	++	√	√	√	√
				Pengelolaan Yang Ambisius Dan Realistis sudah berjalan baik dan terbuka, meskipun masih ada beberapa aspek kecil yang perlu ditingkatkan.	+				
				Pengelolaan Yang Ambisius Dan Realistis ada dan dilaksanakan, namun masih bersifat formalitas atau belum menjangkau seluruh lapisan warga.	0				

			Pengelolaan Yang Ambisius Dan Realistis masih sangat terbatas, sering tertutup, dan warga merasa kesulitan dalam berpartisipasi.	-						
			Tidak ada mekanisme 5.1 Pengelolaan Yang Ambisius Dan Realistis yang jelas; informasi tertutup dan partisipasi warga diabaikan sama sekali.	--						
		5.2	Di Bali kita mengenal konsep Menyama Braya atau hukum adat (Awig-awig). Apakah prinsip transparansi dana desa ini sejalan dengan aturan adat di sini? Apakah Desa Adat pernah dilibatkan untuk mengawasi dana dinas?	Penyematan Wacana berjalan sangat optimal, transparan, melibatkan seluruh pihak, dan sudah membudaya.	++				√	
				Penyematan Wacana sudah berjalan baik dan terbuka, meskipun masih ada beberapa aspek kecil yang perlu ditingkatkan.	+	√	√	√		√
				Penyematan Wacana ada dan dilaksanakan, namun masih bersifat formalitas atau belum menjangkau seluruh lapisan warga.	0					
				Penyematan Wacana masih sangat terbatas, sering tertutup, dan warga merasa kesulitan dalam berpartisipasi.	-					
				Tidak ada mekanisme 5.2 Penyematan Wacana yang jelas; informasi tertutup dan partisipasi warga diabaikan sama sekali.	--					
		5.3	Sejauh mana sinkronisasi antara visi transparansi Kepala Desa dengan implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di lapangan?	Kohesi Kebijakan berjalan sangat optimal, transparan, melibatkan seluruh pihak, dan sudah membudaya.	++	√	√		√	√
				Kohesi Kebijakan sudah berjalan baik dan terbuka, meskipun masih ada beberapa aspek kecil yang perlu ditingkatkan.	+			√		
				Kohesi Kebijakan ada dan dilaksanakan, namun masih bersifat formalitas atau belum menjangkau seluruh lapisan warga.	0					
				Kohesi Kebijakan masih sangat terbatas, sering tertutup, dan warga merasa kesulitan dalam berpartisipasi.	-					

			Tidak ada mekanisme 5.3 Kohesi Kebijakan yang jelas; informasi tertutup dan partisipasi warga diabaikan sama sekali.	--					
6. Agen Perubahan	6.1	Siapakah sosok di desa ini yang paling sering 'cerewet' menanyakan soal anggaran? Apakah desa melihat mereka sebagai mitra kritis atau justru merasa terganggu?	Agen Wirausaha berjalan sangat optimal, transparan, melibatkan seluruh pihak, dan sudah membudaya.	++			√		
			Agen Wirausaha sudah berjalan baik dan terbuka, meskipun masih ada beberapa aspek kecil yang perlu ditingkatkan.	+	√	√		√	√
			Agen Wirausaha ada dan dilaksanakan, namun masih bersifat formalitas atau belum menjangkau seluruh lapisan warga.	0					
			Agen Wirausaha masih sangat terbatas, sering tertutup, dan warga merasa kesulitan dalam berpartisipasi.	-					
			Tidak ada mekanisme 6.1 Agen Wirausaha yang jelas; informasi tertutup dan partisipasi warga diabaikan sama sekali.	--					
	6.2	Apakah tokoh masyarakat berperan sebagai 'penerjemah' data teknis pemerintah agar mudah dipahami warga, guna meningkatkan partisipasi?	Agen Kolaboratif berjalan sangat optimal, transparan, melibatkan seluruh pihak, dan sudah membudaya.	++	√	√	√	√	√
			Agen Kolaboratif sudah berjalan baik dan terbuka, meskipun masih ada beberapa aspek kecil yang perlu ditingkatkan.	+					
			Agen Kolaboratif ada dan dilaksanakan, namun masih bersifat formalitas atau belum menjangkau seluruh lapisan warga.	0					
			Agen Kolaboratif masih sangat terbatas, sering tertutup, dan warga merasa kesulitan dalam berpartisipasi.	-					
			Tidak ada mekanisme 6.2 Agen Kolaboratif yang jelas; informasi tertutup dan partisipasi warga diabaikan sama sekali.	--					

		6.3	Apakah sistem transparansi digital yang dibangun sekarang sudah dipatenkan dalam Perdes (Peraturan Desa), sehingga siapapun Perbekel nanti, sistem ini tidak akan dibongkar pasang lagi?	Agen Visioner berjalan sangat optimal, transparan, melibatkan seluruh pihak, dan sudah membudaya.	++	√	√		√	
				Agen Visioner sudah berjalan baik dan terbuka, meskipun masih ada beberapa aspek kecil yang perlu ditingkatkan.	+			√		√
				Agen Visioner ada dan dilaksanakan, namun masih bersifat formalitas atau belum menjangkau seluruh lapisan warga	0					
				Agen Visioner masih sangat terbatas, sering tertutup, dan warga merasa kesulitan dalam berpartisipasi.	-					
				Tidak ada mekanisme 6.3 Agen Visioner yang jelas; informasi tertutup dan partisipasi warga diabaikan sama sekali.	--					
Pendukung	7. Jaringan Multilevel Provinsi	7.1	Jika ada staf muda yang punya ide baru“misalnya pakai Google Form untuk keluhan warga”apakah ide itu langsung diterima oleh Kepala Desa/Sekdes? Atau birokrasinya rumit?	Ruang Untuk Bermanuver berjalan sangat optimal, transparan, melibatkan seluruh pihak, dan sudah membudaya.	++	√	√		√	√
				Ruang Untuk Bermanuver sudah berjalan baik dan terbuka, meskipun masih ada beberapa aspek kecil yang perlu ditingkatkan.	+			√		
				Ruang Untuk Bermanuver ada dan dilaksanakan, namun masih bersifat formalitas atau belum menjangkau seluruh lapisan warga.	0					
				Ruang Untuk Bermanuver masih sangat terbatas, sering tertutup, dan warga merasa kesulitan dalam berpartisipasi.	-					
				Tidak ada mekanisme 7.1 Ruang Untuk Bermanuver yang jelas; informasi tertutup dan partisipasi warga diabaikan sama sekali.	--					
		7.2	Siapa orang yang sehari-hari benar-benar memegang akun medsos desa atau menjawab	Pembagian Tanggungjawab Yang Jelas berjalan sangat optimal, transparan, melibatkan seluruh pihak, dan sudah membudaya.	++				√	

		WA warga? Apakah itu memang tugas utamanya (PPID), atau dia merangkap banyak pekerjaan lain?	Pembagian Tanggungjawab Yang Jelas sudah berjalan baik dan terbuka, meskipun masih ada beberapa aspek kecil yang perlu ditingkatkan.	+	√	√	√		√
			Pembagian Tanggungjawab Yang Jelas ada dan dilaksanakan, namun masih bersifat formalitas atau belum menjangkau seluruh lapisan warga.	0					
			Pembagian Tanggungjawab Yang Jelas masih sangat terbatas, sering tertutup, dan warga merasa kesulitan dalam berpartisipasi.	-					
			Tidak ada mekanisme 7.2 Pembagian Tanggungjawab Yang Jelas yang jelas; informasi tertutup dan partisipasi warga diabaikan sama sekali.	--					
	7.3	Pernahkah ada perangkat desa yang ditegur atau disanksi karena menyembunyikan informasi? Bagaimana mekanisme penegakan aturannya di internal kantor desa?	Wewenang berjalan sangat optimal, transparan, melibatkan seluruh pihak, dan sudah membudaya.	++					
			Wewenang sudah berjalan baik dan terbuka, meskipun masih ada beberapa aspek kecil yang perlu ditingkatkan.	+	√	√	√	√	√
			Wewenang ada dan dilaksanakan, namun masih bersifat formalitas atau belum menjangkau seluruh lapisan warga.	0					
			Wewenang masih sangat terbatas, sering tertutup, dan warga merasa kesulitan dalam berpartisipasi.	-					
			Tidak ada mekanisme 7.3 Wewenang yang jelas; informasi tertutup dan partisipasi warga diabaikan sama sekali.	--					
	8. Kelayakan Financial	8.1	Biasanya warga itu mau terlibat kalau ada 'uang duduk'-nya atau murni sukarela? Bisa diceritakan pengalaman saat warga gotong royong	Keterjangkauan berjalan sangat optimal, transparan, melibatkan seluruh pihak, dan sudah membudaya.	++	√	√	√	√
				Keterjangkauan sudah berjalan baik dan terbuka, meskipun masih ada beberapa aspek kecil yang perlu ditingkatkan.	+				

		mengawasi pembangunan fisik desa?	Keterjangkauan ada dan dilaksanakan, namun masih bersifat formalitas atau belum menjangkau seluruh lapisan warga.	0					
			Keterjangkauan masih sangat terbatas, sering tertutup, dan warga merasa kesulitan dalam berpartisipasi.	-					
			Keterjangkauan yang jelas; informasi tertutup dan partisipasi warga diabaikan sama sekali.	--					
	8.2	Sejauh mana kerelaan warga untuk mengorbankan waktu dan tenaga (swadaya) dalam mengawasi proyek desa tanpa bayaran?	Kesediaan Konsumen Untuk Membayar berjalan sangat optimal, transparan, melibatkan seluruh pihak, dan sudah membudaya.	++	√	√	√	√	√
			Kesediaan Konsumen Untuk Membayar sudah berjalan baik dan terbuka, meskipun masih ada beberapa aspek kecil yang perlu ditingkatkan.	+					
			Kesediaan Konsumen Untuk Membayar ada dan dilaksanakan, namun masih bersifat formalitas atau belum menjangkau seluruh lapisan warga.	0					
			Kesediaan Konsumen Untuk Membayar masih sangat terbatas, sering tertutup, dan warga merasa kesulitan dalam berpartisipasi.	-					
			Tidak ada mekanisme 8.2 Kesiediaan Konsumen Untuk Membayar yang jelas; informasi tertutup dan partisipasi warga diabaikan sama sekali.	--					
	8.3	Dalam APBDes tahun ini, seberapa besar porsi anggaran untuk komunikasi publik (baliho, website, dll) dibandingkan pos lain? Apakah anggaran ini sering dipotong atau diprioritaskan?	Mekanisme 8.3 Kelanjutan Finansial berjalan sangat optimal, transparan, melibatkan seluruh pihak, dan sudah membudaya.	++					√
			Kelanjutan Finansial sudah berjalan baik dan terbuka, meskipun masih ada beberapa aspek kecil yang perlu ditingkatkan.	+	√	√	√	√	
			Kelanjutan Finansial ada dan dilaksanakan, namun masih bersifat formalitas atau belum menjangkau seluruh lapisan warga.	0					

			Kelanjutan Finansial masih sangat terbatas, sering tertutup, dan warga merasa kesulitan dalam berpartisipasi.	-					
			Tidak ada mekanisme 8.3 Kelanjutan Finansial yang jelas; informasi tertutup dan partisipasi warga diabaikan sama sekali.	--					
9. Kapasitas Pelaksana	9.1	Simulasi: Saya warga melapor jalan rusak via WA. Apa yang terjadi setelah itu? Siapa yang memproses, dan berapa hari sampai saya dapat jawaban?	Instrumen Kebijakan berjalan sangat optimal, transparan, melibatkan seluruh pihak, dan sudah membudaya.	++	√	√		√	√
			Instrumen Kebijakan sudah berjalan baik dan terbuka, meskipun masih ada beberapa aspek kecil yang perlu ditingkatkan.	+			√		
			Instrumen Kebijakan ada dan dilaksanakan, namun masih bersifat formalitas atau belum menjangkau seluruh lapisan warga.	0					
			Instrumen Kebijakan masih sangat terbatas, sering tertutup, dan warga merasa kesulitan dalam berpartisipasi.	-					
			Tidak ada mekanisme 9.1 Instrumen Kebijakan yang jelas; informasi tertutup dan partisipasi warga diabaikan sama sekali.	--					
	9.2	Sejauh mana kepatuhan desa terhadap kewajiban mempublikasikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tepat waktu sesuai regulasi?	Kepatuhan Terhadap Hukum berjalan sangat optimal, transparan, melibatkan seluruh pihak, dan sudah membudaya.	++	√	√		√	√
			Kepatuhan Terhadap Hukum sudah berjalan baik dan terbuka, meskipun masih ada beberapa aspek kecil yang perlu ditingkatkan.	+					
			Kepatuhan Terhadap Hukum ada dan dilaksanakan, namun masih bersifat formalitas atau belum menjangkau seluruh lapisan warga.	0			√		
			Kepatuhan Terhadap Hukum masih sangat terbatas, sering tertutup, dan warga merasa kesulitan dalam berpartisipasi.	-					

			idak ada mekanisme 9.2 Kepatuhan Terhadap Hukum yang jelas; informasi tertutup dan partisipasi warga diabaikan sama sekali.	--						
		9.3	Belajar dari pengalaman darurat, bagaimana cara desa memutuskan penggunaan Dana Darurat (BTT) yang harus cepat? Apakah tetap sempat memanggil BPD?	Kesiapsiagaan berjalan sangat optimal, transparan, melibatkan seluruh pihak, dan sudah membudaya.	++			√	√	√
				Kesiapsiagaan sudah berjalan baik dan terbuka, meskipun masih ada beberapa aspek kecil yang perlu ditingkatkan.	+	√	√			
				Kesiapsiagaan ada dan dilaksanakan, namun masih bersifat formalitas atau belum menjangkau seluruh lapisan warga.	0					
				Kesiapsiagaan masih sangat terbatas, sering tertutup, dan warga merasa kesulitan dalam berpartisipasi.	-					
				Tidak ada mekanisme 9.3 Kesiapsiagaan yang jelas; informasi tertutup dan partisipasi warga diabaikan sama sekali.	--					



Lampiran 12 Dokumentasi Kegiatan





